

**RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Grafik dan Gambar	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Maksud	I-1
1.2 Tujuan	I-1
1.3 Dasar Pertimbangan	I-2
1.4 Ruang Lingkup	I-2
1.5 Sistematika Dokumen	I-2
BAB II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2019	II-1
2.1 Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan II Tahun 2019	II-1
2.2 Evaluasi RPJMD Tahun 2014-2019	II-3
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1 Gambaran Tentang Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah	III-1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-17
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2 Prioritas Pembangunan	IV-4
4.3 Program Pembangunan Daerah Tahun 2019	IV-16
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Capaian Rata-rata RKPD Kabupaten Ciamis pada Triwulan II Tahun 2019 berdasarkan Pelaksanaan Bidang Urusan	II-2
Tabel 2.2	Realisasi RPJMD Kabupaten Ciamis s.d. Tahun 2019 sesuai dengan hasil pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2019	II-5
Tabel 2.3	Tingkat Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis s.d. Triwulan II Tahun 2019	II-7
Tabel 2.4	Rekomendasi Program dan Kegiatan untuk Perubahan RKPD Tahun 2019.....	II-12
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Kabupaten Ciamis Capaian Tahun 2016-2017 dan Estimasi Tahun 2018 (%)	III-2
Tabel 3.2	PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Berlaku Capaian Tahun 2016-2018 Menurut Kategori (Juta Rupiah)	III-4
Tabel 3.3	Capaian PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2018 (Juta Rupiah)	III-4
Tabel 3.4	Indikator Ketenagakerjaan dan Kemiskinan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2018	III-8
Tabel 3.5	Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2020.....	III-10
Tabel 3.6	Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2019-2020	III-13
Tabel 3.7	Perkiraan Indikator Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2020	III-15
Tabel 3.8	Kondisi Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019	III-19
Tabel 3.9	Kondisi Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019.....	III-21
Tabel 3.10	Kondisi Pembiayaan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019	III-22
Tabel 4.1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-2
Tabel 4.2	Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2019	IV-15
Tabel 4.3	Penjelasan Program Pembangunan	IV-22
Tabel 5.1	Rekapitulasi Anggaran Pada Perubahan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Per OPD.....	V-2

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

	Halaman
Gambar 4.1	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional IV-15
Grafik 3.1	Capaian LPE Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2018..... III-2
Grafik 3.2	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2018 Menurut Kategori (AdHB) III-3
Grafik 3.3	Gini Rasio Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2017 III-6
Grafik 3.4	Laju Inflasi Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2018..... III-6
Grafik 3.5	Gini Ratio Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2017 III-7
Grafik 3.6	Inflasi Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2017..... III-8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 14 Tahun 2018 RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2019, RKPD tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 dan juga merupakan pedoman untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) dan penyusunan RKA OPD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan, menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru serta perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Penyesuaian-penyempurnaan dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan yang selanjutnya dijadikan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2019 untuk menyusun perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

1.2. Tujuan

1. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
2. Memberikan dasar hukum penggunaan SiLPA untuk pendanaan kegiatan tahun 2019;
3. Memberikan dasar hukum penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan.

1.3. Dasar Pertimbangan

1. Adanya penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;

2. Adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran 2018 (SiLPA) yang harus digunakan untuk tahun 2019;
3. Adanya pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, dan perubahan indikator kinerja, target, lokasi serta pagu kegiatan.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perubahan RKPD Tahun 2019, meliputi:

1. Perubahan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
2. Perubahan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
3. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.

1.5. Sistematika Dokumen

Perubahan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2019, sebagai pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan;
- BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2019;
- BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- BAB VI Penutup.

BAB II

EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2019

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja, daya serap anggaran, serta identifikasi terhadap hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan. Evaluasi hasil RKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Renja sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Capaian target RKPD merupakan akumulasi dari capaian kinerja Renja OPD pada tahun berkenaan. Selanjutnya, capaian target tahunan (RKPD dan Renja OPD) menjadi sumber data untuk mengukur capaian target rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD). Tingkat capaian RKPD diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

2.1. Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan II Tahun 2019

Disamping untuk mengetahui tingkat capaian kinerja program/kegiatan dengan melakukan evaluasi hasil RKPD Triwulan II Tahun 2019 juga dilakukan pengendalian dan evaluasi untuk memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen anggaran. Hasil pengendalian dan evaluasi Triwulan II dimaksud, telah diklarifikasi dengan setiap OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Hasil pengendalian dan evaluasi telah disempurnakan oleh seluruh OPD bersama-sama dengan Bappeda, sehingga hasil evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2019 diharapkan lebih baik dan telah sesuai dengan dokumen yang ada, sehingga hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai gambaran pelaksanaan pembangunan Kabupaten Ciamis s.d. Triwulan II Tahun 2019.

Berdasarkan data evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II, dari sejumlah 164 program dalam RKPD yang dilaksanakan dalam APBD sebanyak 148 program, dengan rata-rata capaian RKPD Kabupaten Ciamis adalah 28,97% (Sangat Rendah) untuk rata-rata capaian kinerja fisik, sedangkan rata-rata capaian kinerja keuangan adalah 21,97% (Sangat Rendah).

Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RKPD dimaksud seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.

Capaian Rata-rata RKPD Kabupaten Ciamis pada Triwulan II Tahun 2019 berdasarkan Pelaksanaan Bidang Urusan

No.	Urusan/Bidang Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	CAPAIAN RKPD			
				s.d. Triwulan II 2019 (%)			
				Kinerja Fisik (%)	Predikat Kinerja	Kinerja Keuangan (Rp)	Predikat Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	46	379	15,70	(Sangat Rendah)	17,73	(Sangat Rendah)
1.01	Pendidikan	5	77	46,89	(Sangat Rendah)	28,21	(Sangat Rendah)
1.02	Kesehatan	15	59	17,32	(Sangat Rendah)	29,47	(Sangat Rendah)
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	129	1,41	(Sangat Rendah)	1,83	(Sangat Rendah)
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5	67	3,77	(Sangat Rendah)	2,27	(Sangat Rendah)
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5	33	36,65	(Sangat Rendah)	68,78	(Sedang)
1.06	Sosial	5	14	29,90	(Sangat Rendah)	53,92	(Rendah)
2	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar	48	250	15,77	(Sangat Rendah)	23,67	(Sangat Rendah)
2.01	Tenaga Kerja	4	11	44,01	(Sangat Rendah)	41,90	(Sangat Rendah)
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	8	15,90	(Sangat Rendah)	23,02	(Sangat Rendah)
2.03	Pangan	1	29	7,00	(Sangat Rendah)	10,04	(Sangat Rendah)
2.04	Pertanahan	1	2	0,00	(Sangat Rendah)	24,34	(Sangat Rendah)
2.05	Lingkungan Hidup	7	27	17,18	(Sangat Rendah)	17,32	(Sangat Rendah)
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	12	37,13	(Sangat Rendah)	20,96	(Sangat Rendah)
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	22	20,04	(Sangat Rendah)	38,11	(Sangat Rendah)
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	18	0,87	(Sangat Rendah)	38,72	(Sangat Rendah)
2.09	Perhubungan	5	28	2,76	(Sangat Rendah)	10,87	(Sangat Rendah)
2.10	Komunikasi dan Informatika	3	14	41,20	(Sangat Rendah)	36,08	(Sangat Rendah)
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	7	72,80	(Sedang)	40,94	(Sangat Rendah)
2.12	Penanaman Modal	2	9	45,97	(Sangat Rendah)	63,97	(Rendah)
2.13	Kepemudaan dan Olahraga	4	17	13,25	(Sangat Rendah)	13,06	(Sangat Rendah)
2.14	Statistik	1	3	44,83	(Sangat Rendah)	52,44	(Rendah)
2.15	Persandian	1	3	25,64	(Sangat Rendah)	38,13	(Sangat Rendah)
2.16	Kebudayaan	3	15	84,11	(Tinggi)	82,97	(Tinggi)
2.17	Perpusatkaan	1	13	25,36	(Sangat Rendah)	24,09	(Sangat Rendah)
2.18	Kearsipan	3	12	36,68	(Sangat Rendah)	45,39	(Sangat Rendah)
3	Urusan Pemerintahan Pilihan	18	85	36,27	(Sangat Rendah)	19,17	(Sangat Rendah)
3.01	Kelautan dan Perikanan	2	8	6,66	(Sangat Rendah)	14,78	(Sangat Rendah)
3.02	Pariwisata	4	13	51,03	(Rendah)	53,19	(Rendah)
3.03	Pertanian	8	37	10,53	(Sangat Rendah)	25,91	(Sangat Rendah)
3.04	Perdagangan	2	21	50,12	(Rendah)	10,71	(Sangat Rendah)
3.05	Perindustrian	1	4	90,11	(Sangat Tinggi)	75,54	(Tinggi)

No.	Urusan/Bidang Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	CAPAIAN RKPD			
				s.d. Triwulan II 2019 (%)			
				Kinerja Fisik (%)	Predikat Kinerja	Kinerja Keuangan (Rp)	Predikat Kinerja
3.06	Transmigrasi	1	2	33,49	(Sangat Rendah)	31,56	(Sangat Rendah)
4	Penunjang Urusan Pemerintahan	12	119	32,22	(Sangat Rendah)	31,96	(Sangat Rendah)
4.01	Perencanaan	4	21	28,97	(Sangat Rendah)	48,51	(Sangat Rendah)
4.02	Keuangan	1	58	22,41	(Sangat Rendah)	25,25	(Sangat Rendah)
4.03	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	4	29	35,71	(Sangat Rendah)	34,25	(Sangat Rendah)
4.04	Penelitian dan Pengembangan	1	2	28,72	(Sangat Rendah)	42,82	(Sangat Rendah)
4.05	Pengawasan	2	9	77,78	(Tinggi)	51,02	(Rendah)
5	Pendukung	17	316	25,40	(Sangat Rendah)	41,90	(Sangat Rendah)
5.01	Sekretariat Daerah	15	62	11,84	(Sangat Rendah)	43,32	(Sangat Rendah)
5.02	Sekretariat DPRD	1	7	54,37	(Sangat Rendah)	55,61	(Rendah)
5.03	Kecamatan	1	247	22,36	(Sangat Rendah)	25,87	(Sangat Rendah)
6	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	2	4	46,24	(Sangat Rendah)	42,93	(Sangat Rendah)
6.01	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	2	4	46,24	(Sangat Rendah)	42,93	(Sangat Rendah)
7	Non Urusan	5	1203	95,52	(Sangat Tinggi)	38,23	(Sangat Rendah)
7.01	Non Urusan	5	1203	95,52	(Sangat Rendah)	38,23	(Sangat Rendah)
JUMLAH 1 + 2		148	2.356	24,84	(Sangat Rendah)	21,04	(Sangat Rendah)

Persentase capaian kinerja untuk pelaksanaan program kegiatan dari Belanja Langsung APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Triwulan II berdasarkan urusan, persentase realisasi fisik tertinggi dicapai oleh Non Urusan sebesar 95,52% dan persentase realisasi fisik terendah yaitu urusan Pertanahan sebesar 0,00%, sedangkan persentase realisasi keuangan tertinggi dicapai oleh urusan Kebudayaan sebesar 82,97%, sedangkan persentase realisasi keuangan terendah yaitu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 1,81%.

Tabel di atas juga menggambarkan bahwa terdapat 30 urusan dan 1 non urusan realisasi kinerja keuangannya masih di bawah 50% (Sangat Rendah), 6 urusan realisasi kinerja keuangannya pada kisaran 50% - 65% (Rendah), 1 urusan realisasi kinerja keuangannya pada kisaran 65% - 75% (Sedang), dan 2 urusan realisasi anggarannya pada kisaran 75% - 90% (Tinggi).

2.2. Evaluasi RPJMD Tahun 2014-2019

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan Daerah, dengan berpedoman pada peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025.

RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2014, dengan pelaksanaan RKPD tahun 2014 s.d. tahun 2019. Sedangkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019, yang ditetapkan pada tanggal 29 Juni 2018, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan tanggal 31 Desember 2018, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan tanggal 31 Desember 2018, dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan tanggal 18 Februari 2019, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan tanggal 19 Maret 2019, dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan tanggal 6 Mei 2019.

Dalam pengendalian dan evaluasi RPJMD maupun Renstra SKPD, berdasarkan analisis terhadap Renstra SKPD, ditemukan bahwa pagu indikatif Renstra SKPD untuk tahun 2019 tidak sesuai dengan RPJMD.

2.2.1. Realisasi Anggaran RPJMD

Realisasi anggaran RPJMD merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam RKPD selama 5 tahun. Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan.

Realisasi RPJMD Kabupaten Ciamis s.d. Tahun 2019 sesuai dengan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Realisasi RPJMD Kabupaten Ciamis s.d. Tahun 2019 sesuai dengan hasil pelaksanaan
RKPD Triwulan II Tahun 2019

No.	Urusan/Bidang Urusan	Pagu Indikatif (RPJMD)	Realisasi Pagu Anggaran (RKPD)	
		Rp.	Rp.	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	407,008,514,254.00	3,345,763,546,919.00	822.04
1.01	Pendidikan	41,301,111,390.00	579,326,199,769.00	1,402.69
1.02	Kesehatan	167,864,171,167	473,084,092,650.00	281.83
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	157,379,694,767	1,983,500,884,250.00	1,260.33
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	24,782,144,000	235,061,083,200.00	948.51
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	11,677,358,652	13,618,707,050.00	116.62
1.06	Sosial	4,004,034,278	61,172,580,000.00	1,527.77
2	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar	151,073,594,110.00	441,988,794,484.00	292.57
2.01	Tenaga Kerja	6,524,890,188	3,463,262,000	53.08
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,035,388,618	3,880,000,000	190.63
2.03	Pangan	2,947,674,232	36,558,000,000	1,240.23
2.04	Pertanahan	2,767,127,000	695,872,600	25.15
2.05	Lingkungan Hidup	50,987,353,600	111,618,505,000	218.91
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,258,112,780	13,034,356,500	577.22
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14,866,324,375	21,321,132,500	143.42
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10,637,463,711	15,457,676,230	145.31
2.09	Perhubungan	17,547,000,000	87,785,000,000	500.28
2.1	Komunikasi dan Informatika	2,713,307,550	16,195,000,000	596.87
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	16,225,000,000	10,180,000,000	62.74
2.12	Penanaman Modal	597,338,775	2,853,780,000	477.75
2.13	Kepemudaan dan Olahraga	14,419,906,250	60,925,000,000	422.51
2.14	Statistik	1,200,000,000	2,075,000,000	172.92
2.15	Persandian	240,000,000	753,534,654	313.97
2.16	Kebudayaan	4,699,707,031	36,360,000,000	0.00
2.17	Perpustakaan	224,000,000	18,482,675,000	8,251.19
2.18	Kearsipan	183,000,000	350,000,000	191.26
3	Urusan Pemerintahan Pilihan	553,205,300,079	322,668,524,100	58.33
3.01	Kelautan dan Perikanan	8,140,350,410	36,758,000,000	451.55
3.02	Pariwisata	2,800,000,000	33,437,649,000	1,194.20
3.03	Pertanian	525,212,098,100	182,787,060,000	34.80
3.04	Perdagangan	11,360,000,000	63,118,815,100	555.62
3.05	Perindustrian	5,485,000,000	6,325,000,000	115.31
3.06	Transmigrasi	207,851,569	242,000,000	116.43
4	Penunjang Urusan Pemerintahan	51,618,087,500	57,095,075,600	110.61

No.	Urusan/Bidang Urusan	Pagu Indikatif (RPJMD)	Realisasi Pagu Anggaran (RKPD)	
		Rp.	Rp.	%
4.01	Perencanaan	3,870,000,000	6,835,000,000	176.61
4.02	Keuangan	36,465,187,500	37,686,058,600	103.35
4.03	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	6,337,900,000	6,000,000,000	94.67
4.04	Penelitian dan Pengembangan	350,000,000	480,000,000	137.14
4.05	Pengawasan	4,595,000,000	6,094,017,000	132.62
5	Pendukung Urusan Pemerintahan	34,183,865,844	22,467,666,950	65.73
5.01	Sekretariat Daerah	25,199,758,429	12,651,950,150	50.21
5.02	Sekretariat DPRD	6,469,084,465	6,322,025,000	97.73
7.01	Kecamatan	2,515,022,950	3,493,691,800	138.91
6	Urusan Pemerintahan Umum	1,600,000,000	5,885,000,000	367.81
6.01	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1,600,000,000	5,885,000,000	367.81
8	Non Urusan	0	260,140,625,025	0.00
8.01	Non Urusan	0	260,140,625,025	0.00
JUMLAH 1 + 2		1,198,689,361,787	4,456,009,233,078	371,74

Total pagu indikatif seluruh program dalam RPJMD Tahun 2014-2019 sampai dengan tahun 2018 adalah Rp2.265.443.740.785,89, dan dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total pagu indikatif dalam RKPD pada tahun 2019 sejumlah Rp4.456.009.233.078,00, dengan pagu APBD sebesar Rp1.198.689.361.787,00 atau 371,74%.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, rata-rata realisasi anggaran RPJMD (realisasi pelaksanaan RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2019) adalah 130,42%. Realisasi tersebut merupakan persentase pagu indikatif program dalam RPJMD selama 5 tahun yang telah dilaksanakan melalui kegiatan dalam Renstra OPD. Realisasi RPJMD dipengaruhi oleh konsistennya kegiatan dalam Renstra OPD dijabarkan ke dalam Renja OPD dan lalu dianggarkan dalam APBD. Pagu indikatif program dalam RPJMD tahun 2014 sampai dengan 2019 mencapai Rp3.464.133.102.572,89, dan realisasi pagu program dalam APBD tahun 2014 sampai dengan 2019 mencapai Rp4.571.792.969.860,00.

2.2.2. Tingkat Capaian RPJMD

Capaian RPJMD merupakan akumulasi hasil pelaksanaan RKPD setiap tahun. Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan.

Tingkat capaian RPJMD s.d. Triwulan II Tahun 2019 sementara, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3
Tingkat Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis s.d. Triwulan II
Tahun 2019

NO. MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI S.D. TAHUN 2018	TAHUN 2019			CAPAIAN KINERJA S.D. TRW II TAHUN 2019	
				TARGET RPJMD	REALISASI S.D. TRW II	CAPAIAN KINERJA RPJMD (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia							
1	Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas	1.2	Indeks Pendidikan	65,63	69,79	65,63	94,04	0,94
		1.3	RLS	7,73	7,8	7,73	99,10	99,10
		1.4	Harapan Lama Sekolah	13,60	14,66	13,68	93,32	93,32
2	Meningkatnya budaya dan minat baca	2.1	Jumlah Perpustakaan daerah & perpustakaan keliling	342	208	342	164,42	164,42
3	Meningkatnya layanan kesehatan	3.1	Indeks Kesehatan	78,48	78,66	78,48	99,77	99,77
		3.2	Angka Harapan Hidup	71,13	70,6	71,13	100,75	100,75
		3.3	AKI	15	15	15	100,00	100,00
		3.4	AKB	135	199	135	67,84	67,84
4	Meningkatnya kesehatan lingkungan	4.1	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	54	55	54	98,18	98,18
5	Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk	5.1	LPP	0,5624	0,44	0	0,00	0,00
6	Meningkatnya partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan	6.3	Prestasi Pemuda Pelopor	8	8	0	0,00	0,00
7	Meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan	7.3	Indeks Development Gender	63,67	63,67	63,67	100,00	100,00
8	Meningkatnya prestasi olahraga	8.1	Jumlah atlet berprestasi (orang)	4	5	0	0,00	0,00
		9.3	Jumlah kelompok seni	420	68	420	617,65	617,65
9	Pengembangan dan penguatan nilai budaya yang berkembang di masyarakat	9.4	Jumlah upacara adat tradisional	32	32	32	100,00	100,00
		10.1	Tempat ibadah yang menerima bantuan:					
- Mesjid	914		755	0	0,00	0,00		
- Gereja	0		4	0	0,00	0,00		
		- Kelenteng	0	1	0	0,00	0,00	
11	Mewujudkan harmonisasi dan kerukunan antar kelompok masyarakat, antar umat beragama maupun antar umat beragama serta pengembangan toleransi terhadap keragaman agama	11.1	Kasus berlatar belakang sara	0	0	0	100,00	100,00
12	Menurunnya tingkat kemiskinan	12.1	Jumlah penduduk miskin	85,72	78,516	0	0,00	0,00
13	Terlindunginya perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan	13.1	Jumlah KDRT terhadap ibu dan anak	5	10	0	0,00	0,00
		13.2	Persentase penanganan KDRT dan Trafficking	100	100	0	0,00	0,00
14	Menurunnya PMKS	14.1	Penurunan jumlah PMKS	3	12,96	0	0,00	0,00
II	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat							
15	Meningkatnya kualitas SDM	15.1	Kapasitas aparatur :					

NO. MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI S.D. TAHUN 2018	TAHUN 2019			CAPAIAN KINERJA S.D. TRW II TAHUN 2019
				TARGET RPJMD	REALISASI S.D. TRW II	CAPAIAN KINERJA RPJMD (%)	
	aparatur	- PNS berijazah S1,S2,S3	60,02	55	60,02	109,13	109,13
16	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi	- Penilaian SAKIP;	B	B	-	-	-
		- Predikat penilaian LPPD;	Tinggi	Sangat tinggi	-	-	-
		- Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	-	-	-
		16,4 Level Maturitas SPIP	3	3		0,00	0,00
17	Meningkatnya transparansi	17,1 Kepemilikan web pemerintah	Ada	1	1	100,00	100,00
18	Meningkatnya pelayanan masyarakat	18,1 Indeks Kepuasan Masyarakat	80,92	100	0	0,00	0,00
19	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	19,1 Kepemilikan KTP	89,86	100	89,86	89,86	89,86
20	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik	21,1 Tingkat Partisipasi dalam Pemilu					
		- Pemilu Legislatif		77	78,21	101,571	101,57
		- Pemilu Presiden		82	0	0,00	0,00
		- Pemilu Kepala Daerah Gubernur		75	78,16	104,213	104,21
		- Pemilu Kepala Daerah Bupati		70	78,26	111,8	111,8
21	Meningkatnya Kesadaran Hukum masyarakat	20,2 Jumlah desa sadar hukum	200	45	0	0,00	0,00
22	Terciptanya supremasi hukum dan perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM)	21,1 Cakupan penegakan perda dan/atau perkada	483	956	0	0,00	0,00
23	Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	22,1 Jumlah anggota Linmas per 10.000 penduduk	38	48	54,74	114,042	114,04
		22,1 Jumlah Kriminalitas	375	<375	0	0,00	0,00
24	Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dunia usaha dan perguruan tinggi	23,1 Jumlah kerjasama	2	1	0	0,00	0,00
III	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan						
24	Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi	24,1 Kemantapan jalan kabupaten	70,83	67,25	70,83	105,323	105,3234
		24,3 Jumlah ruas jalan kabupaten yang dilalui angkutan penumpang umum	12	12	12	100	100
		24,4 Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	375	<322	0	0,00	0,00
25	Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air	25,1 Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	29,95	22,562	29,78	131,992	131,9918
26	Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	26,1 Cakupan desa/kelurahan dengan akses sarana prasarana dasar permukiman	73,06	94	22,64	24,0851	24,08511
27	Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi, ketenagalistrikan dan pembinaan usaha tambang	27,1 Rasio elektrifikasi rumah tangga	-	99,37	0	0,00	0,00

NO. MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI S.D. TAHUN 2018	TAHUN 2019			CAPAIAN KINERJA S.D. TRW II TAHUN 2019	
				TARGET RPJMD	REALISASI S.D. TRW II	CAPAIAN KINERJA RPJMD (%)		
28	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	28,5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,58	69,58	69,58	100	100	
29	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola Pemerintah	29,1 Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah di Wilayah Perkotaan	2,07	1,44	1,41	97,92	97,92	
30	Meningkatakan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat	30,2 Persentase kejadian bencana alam yang tidak ada korban jiwa (dan material)	7,19	19,74	0	0,00	0,00	
31	Meningkatnya kualitas penataan ruang	31,1 Jumlah Rencana Tata Ruang	18	12	18	150,00	150,00	
IV	Membangun perekonomian daerah yang tangguh							
32	Meningkatnya peran koperasi, UMKM dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat	32,1 Jumlah koperasi aktif	327	369	327	88,62	88,62	
		32,2 Jumlah UMKM	14.692	14.283	14.692	102,86	102,86	
33	Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal	33,1 Lama proses perijinan	10	10	10	100,00	100,00	
		33,2 Realisasi nilai investasi		205	0	0,00	0,00	
34	Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah	34,1 Jumlah produk yang telah dilindungi oleh Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	12	14	12	85,7143	85,71429	
		34,2 Jumlah komoditas yang diunggulkan yang bersertifikat	2	6	0	0,00	0,00	
		34,3 Jumlah kunjungan wisatawan	506	650	0	0,00	0,00	
35	Terwujudnya sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi unggulan lokal	35,1 Jenis komoditi industri	30	32	30	93,75	93,75	
36	Meningkatnya kualitas sarana prasarana perekonomian masyarakat	36,1 Jumlah pasar pemda	4	4	4	100,00	100,00	
		36,2 Jumlah pasar desa	48	48	48	100,00	100,00	
37	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan	37,1 LPE		5,05		0,00	0,00	
		37,2 PDRB Per kapita (AdHB)						
		37,3 Daya Beli Masyarakat	8.966.330,00	8.367.500,00		0,00	0,00	
		37,4 Inflasi	3,04	7,04		0,00	0,00	
		37,5 Pengangguran	4,6	5,32		0,00	0,00	
		37,6 Indeks Gini	0,33	0,31		0,00	0,00	
38	Terjaminnya lahan pertanian berkelanjutan	38,1 Luas tanah pertanian pangan berkelanjutan	18.190,00	16.802.29	18.190,00	0,00	0,00	
39	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan	39,1	Jumlah produksi sektor pertanian		577.476,00		0,00	0,00
			Jumlah produksi sektor perkebunan		21.364,21		0,00	0,00
			Jumlah produksi sektor peternakan		75.951,70		0,00	0,00
			Jumlah produksi sektor perikanan		97,71		0,00	0,00
		39,3 Konsumsi ikan	18,62	18,64	0	0,00	0,00	

NO. MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI S.D. TAHUN 2018	TAHUN 2019			CAPAIAN KINERJA S.D. TRW II TAHUN 2019	
				TARGET RPJMD	REALISASI S.D. TRW II	CAPAIAN KINERJA RPJMD (%)		
40	Berkembangnya berbagai aktivitas off farm untuk meningkatkan penghasilan petani	40,1	Jumlah promosi hasil					
			a. Pertanian/perkebunan	5	5	0,00	0,00	
			b. Peternakan	8	4	0,00	0,00	
		c. Kehutanan	6	1	0,00	0,00		
		40,2	Nilai Tukar Petani (NTP)	112,01	106	0,00	0,00	
41	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan	41,1	Cadangan pangan daerah dan masyarakat;	97,8	110	97,8	88,91	88,91
		41,2	Stabilisasi harga dan pasokan pangan	90	90	90	100,00	100,00
		41,3	Persentase Angka Kecukupan Energi (%AKE)	100	100	100	100,00	100,00
V	Meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan							
42	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan BPD	42,1	Aparatur desa yang mengikuti diklat	1,032	100		0,00	0,00
		42,2	Bangunan desa dalam kondisi baik	88	85,27	88	103,20	103,20
43	Menurunnya jumlah desa tertinggal	43,1	Jumlah desa tertinggal	27	26	27	103,85	103,85
44	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa	44,1	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) aktif	265	265	265	100,00	100,00
45	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa	45,1	Jumlah Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif	249	294	249	84,69	84,69
46	Penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan	46,1	Jumlah Desa Swasembada	59	60	59	98,33	98,33

Berdasarkan uraian pada bagian ini, dapat diukur pencapaian RPJMD maupun RKPD Kabupaten Ciamis sampai dengan Triwulan II Tahun 2019. Terkait dengan pelaksanaan RKPD Tahun 2019, selain pencapaian target kinerja dan anggaran, hal penting lainnya yang harus diidentifikasi adalah faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan.

Berdasarkan data pada tabel diatas, secara umum pelaksanaan pembangunan Kabupaten Ciamis berdasarkan RPJMD Tahun 2014-2019 sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 yang terdiri dari 46 Sasaran telah mencapai bahkan melebihi target (capaian kinerja >100%), kecuali untuk beberapa sasaran khususnya pada Misi II dan III belum mencapai target.

Terkait dengan pelaksanaan RKPD Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II, selain pencapaian target kinerja dan anggaran, hal penting lainnya yang harus diidentifikasi adalah faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian (hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target) diantaranya ketersediaan dana tepat waktu, terjalannya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan perangkat daerah maupun instansi terkait lainnya. Faktor

penghambat pencapaian kinerja (hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas) diantaranya proses administrasi pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan, kondisi iklim yang tidak mendukung, serta mutasi jabatan.

2.2.3. Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2019

Beberapa catatan atas hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat perbedaan indikator dari kegiatan yang sama hanya berbeda OPD sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan evaluasi.
2. Beberapa kegiatan dalam Renstra OPD belum sesuai dengan kerangka pendanaan dalam RPJMD serta selisih pagu program antara RPJMD dan Renstra OPD. Disamping itu, data dan informasi yang dimuat dalam beberapa Renstra OPD belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang ada.
3. Judul dan pagu program/kegiatan dalam RKPD/APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2019 adalah judul dan pagu program dalam RPJMD/Renstra OPD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 untuk tahun keempat yaitu tahun 2019.
4. Hasil evaluasi Renja OPD belum memuat faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan.
5. Konsistensi judul, indikator, target, kelompok sasaran, lokasi, dan pagu anggaran program/kegiatan pada setiap dokumen akan membuat mudah pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, sehingga hambatan/kendala maupun keberhasilan pembangunan dapat diketahui sejak dini.
6. Perlu penyempurnaan ketentuan tentang indikator dan satuan target kegiatan agar program kegiatan yang sama pada seluruh OPD memiliki indikator dan target yang sama sehingga memudahkan dalam pelaksanaan evaluasi.
7. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra OPD dalam rangka memastikan kesesuaian antara Renstra OPD dengan RPJMD, serta memberikan fasilitasi dan pendampingan secara khusus dalam penyusunan hasil evaluasi Renstra dan Renja OPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi diantaranya : (1) perkembangan yang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau (2) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

penambahan kegiatan baru akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Perubahan RKPD dimaksud meliputi perubahan : 1) kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; 2) target sasaran pembangunan Daerah; 3) prioritas pembangunan Daerah; 4) penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan 5) target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka rekomendasi kebijakan dan program/kegiatan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4.
Rekomendasi Program dan Kegiatan untuk Perubahan RKPD Tahun 2019

No.	Urusan	Evaluasi RKPD Tahun 2018	Evaluasi RKPD Tahun 2019 s.d. Triwulan II	Rekomendasi
I	Wajib Pelayanan Dasar			
1	Urusan Pendidikan	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk meningkatkan pencapaian AMH, RLS, Partisipasi anak usia dini dalam PAUD, dan 7 indikator lainnya	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk pencapaian target indikator kinerja dan penambahan program dan kegiatan yang sudah tercantum dalam RKPD diantaranya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, penatausahaan sistem informasi pendidikan; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
2	Urusan Kesehatan	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk menurunkan jumlah kematian bayi, AHH, jumlah balita gizi buruk, rasio posyandu per satuan balita, dan mempertahankan atau meningkatkan capaian 14 indikator lainnya	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk pencapaian target indikator kinerja dan penambahan program dan kegiatan yang sudah tercantum dalam RKPD diantaranya Jamkesmas PBI, pembangunan rumah sakit, dan pengadaan alat kesehatan; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk meningkatkan kemantapan jalan kabupaten, panjang jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik, dan 7 indikator lainnya	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk mempertahankan tingkat kemantapan jalan kabupaten (kondisi baik), meningkatkan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya melalui penambahan program dan kegiatan yang sudah tercantum dalam RKPD diantaranya pembangunan gedung kantor; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk meningkatkan persentase rumah tangga pengguna air bersih di perkotaan dan perdesaan, persentase rumah layak huni, persentase Tempat Pemakaman Umum per satuan Penduduk dan 4 indikator lainnya	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk pencapaian indikator kinerja dan penambahan program dan kegiatan yang sudah tercantum dalam RKPD; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk ketersediaan dokumen rencana tata ruang,	Nilai kinerja keuangan : Sedang (pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk pencapaian target indikator kinerja urusan ketenteraman, ketertiban umum dan

No.	Urusan	Evaluasi RKPD Tahun 2018	Evaluasi RKPD Tahun 2019 s.d. Triwulan II	Rekomendasi
	Umum dan Perlindungan Masyarakat	pengendalian alih fungsi lahan, dan 2 indikator lainnya	persyaratan minimal), dan Nilai kinerja fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	perlindungan masyarakat, serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
13	Urusan Sosial	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial, dan sarana sosial	Nilai kinerja keuangan : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan), Nilai kinerja fisik : Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk menurunkan tingkat kemiskinan, penanggulangan PMKS; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
II Wajib Non Pelayanan Dasar				
7	Urusan Tenaga Kerja	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk penurunan angka pengangguran, peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja, serta keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk penurunan angka pengangguran, peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja, serta keselamatan dan perlindungan tenaga kerja; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, persentase penanganan KDRT dan <i>trafficking</i> dan 3 indikator lainnya	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk meningkatkan <i>Indeks Development Gender</i> ; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
9	Urusan Pangan	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk implementasi regulasi ketahanan pangan, dan ketersediaan pangan utama (padi dan jagung).	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk optimalisasi pencapaian Skor Pola Pangan Harapan; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
10	Urusan Pertanahan	Indikasi program dan kegiatan ditujukan penataan dan penyelesaian masalah pertanahan.	Nilai kinerja keuangan : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan), dan Nilai kinerja fisik : Sedang (pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk penataan dan penyelesaian masalah pertanahan; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
11	Urusan Lingkungan Hidup	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk meningkatkan persentase penanganan sampah, persentase kasus lingkungan yang ditindaklanjuti, pencegahan pencemaran air, persentase RTH yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah di wilayah perkotaan, persentase luas kawasan lindung dan berfungsi lindung terhadap luas wilayah dan 4 indikator lainnya	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk pencapaian target meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk meningkatkan kepemilikan KTP, akte kelahiran per 1.000 penduduk, penerapan KTP nasional berbasis NIK dan 2 indikator lainnya	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk meningkatkan kepemilikan KTP, akte kelahiran per 1.000 penduduk, penerapan KTP nasional berbasis NIK; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa, dan pembinaan PKK dan posyandu	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat perdesaan dalam pembangunan; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut
14	Urusan Pengendalian Penduduk dan	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk menurunkan rata-rata jumlah jiwa dalam	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk meningkatkan jumlah peserta KB aktif dan rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita (UKPW);

No.	Urusan	Evaluasi RKPD Tahun 2018	Evaluasi RKPD Tahun 2019 s.d. Triwulan II	Rekomendasi
	Keluarga Berencana	keluarga, dan meningkatkan cakupan peserta KB aktif	capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut
15	Urusan Perhubungan	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk meningkatkan jumlah fasilitas keselamatan lalulintas, jumlah halte, jumlah terminal dalam kondisi baik, jumlah Uji KIR baik untuk angkutan umum dan angkutan tidak umum	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk meningkatkan jumlah fasilitas keselamatan lalulintas, jumlah halte, jumlah terminal dalam kondisi baik, jumlah Uji KIR baik untuk angkutan umum dan angkutan tidak umum, penambahan kegiatan pembangunan gedung kantor; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
16	Urusan Komunikasi dan Informatika	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk pengembangan website milih pemerintah daerah	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk pengembangan <i>website</i> milik pemerintah daerah; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut
17	Urusan Koperasi dan UKM	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk peningkatan persentase koperasi aktif, peningkatan jumlah UMKM dan UMK	Nilai kinerja keuangan : Sedang (pencapaian/ realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal), dan Nilai kinerja fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk peningkatan persentase koperasi aktif, peningkatan jumlah UMKM dan UMK; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
18	Urusan Penanaman Modal	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk peningkatan layanan perizinan, dan peningkatan jumlah investasi	Nilai kinerja keuangan : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan), dan Nilai kinerja fisik: Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk peningkatan layanan perizinan, dan peningkatan jumlah investasi; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
19	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk peningkatan jumlah lapangan olahraga, organisasi olahraga, organisasi pemuda, dan jumlah kegiatan olahraga	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
20	Urusan Statistik	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan data/informasi/statistik daerah	Nilai kinerja keuangan : Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan), Nilai kinerja fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan pemenuhan kebutuhan data/informasi/statistik daerah; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
21	Urusan Persandian	Indikasi program dan kegiatan ditujukan diantaranya untuk optimalisasi pelayanan dan administrasi pemerintahan	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk optimalisasi pelayanan dan administrasi pemerintahan; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
22	Urusan Kebudayaan	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk penyelenggaraan festival seni dan budaya, serta pemeliharaan situs seni dan budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Tinggi (pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk penyelenggaraan festival seni dan budaya, serta pemeliharaan situs seni dan budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
23	Urusan Perpustakaan	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk meningkatkan jumlah perpustakaan, koleksi buku perpustakaan daerah dan jumlah pengunjung perpustakaan	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk meningkatkan budaya baca masyarakat; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.

No.	Urusan	Evaluasi RKPD Tahun 2018	Evaluasi RKPD Tahun 2019 s.d. Triwulan II	Rekomendasi
24	Urusan Kearsipan	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk peningkatan penerapan pengelolaan arsip secara baku	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk peningkatan penerapan pengelolaan arsip secara baku; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
III	Pilihan			
25	Urusan Kelautan dan Perikanan	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk peningkatan produksi dan produktivitas ikan, dan peran sub sektor perikanan terhadap perekonomian daerah	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk pengembangan kawasan perikanan andalan; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
26	Urusan Pariwisata	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk meningkatkan kunjungan wisata dan peran sub sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk meningkatkan kunjungan wisata, pembangunan <i>Tourist Information Centre</i> ; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
27	Urusan Pertanian	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk peningkatan produksi dan produktivitas padi, jagung, kedelai, cabe merah, pisang, dan manggis	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi untuk penambahan program dan kegiatan yang sudah tercantum dalam RKPD dalam rangka pengembangan tanaman kelapa, Posluhdes, pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur, pengembangan Jalan Usaha Tani, dan BOP penyuluhan; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
28	Urusan Perdagangan	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk peningkatan peran sub sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah, dan penyediaan pasar Pemda dan pasar desa	Nilai kinerja keuangan : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan) dan Nilai kinerja fisik : Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi untuk penambahan program dan kegiatan yang sudah tercantum dalam RKPD dalam rangka pembinaan cukai tembakau; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
29	Urusan Perindustrian	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk peningkatan peran sub sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah dan pembinaan kelompok pengrajin	Nilai kinerja keuangan : Tinggi (pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi kinerja) dan Nilai kinerja fisik : Sangat Tinggi (pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk peningkatan peran sub sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah dan pembinaan kelompok pengrajin; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
30	Urusan Ketransmigrasian	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk membuka peluang bagi masyarakat Kabupaten Ciamis yang memenuhi syarat untuk melakukan transmigrasi yang berdampak bagi peningkatan taraf hidupnya	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk mengoptimalkan pencapaian <i>outcome</i> program transmigrasi, serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
IV	Penunjang			
31	Urusan Perencanaan	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dengan pendekatan <i>tematik, holistik, integratif, dan spasial</i> .	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan dalam rangka sinergitas dan integrasi perencanaan pembangunan; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
32	Urusan Keuangan	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, dan akuntabilitas pelaporan keuangan.	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, dan akuntabilitas pelaporan keuangan; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.

No.	Urusan	Evaluasi RKPD Tahun 2018	Evaluasi RKPD Tahun 2019 s.d. Triwulan II	Rekomendasi
33	Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk pelayanan dan administrasi pegawai, serta untuk meningkatkan kinerja pegawai.	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
34	Urusan Penelitian dan Pengembangan	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk koordinasi penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, analisis data perencanaan pembangunan, serta kebijakan inovasi daerah.	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan dalam rangka koordinasi penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, analisis data perencanaan pembangunan, serta kebijakan inovasi daerah; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
35	Pengawasan	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.	Nilai kinerja keuangan : Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan), Nilai kinerja fisik : Tinggi (pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target)	Indikasi program/kegiatan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
V	Pendukung	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk optimalisasi pelayanan dan administrasi pemerintahan	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan dalam rangka optimalisasi pelayanan dan administrasi pemerintahan; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
VI	Urusan Pemerintahan Umum	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk pembinaan politik daerah, pembinaan LSM, Ormas dan OKP.	Nilai kinerja keuangan : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan), dan Nilai kinerja fisik : Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk pembinaan politik daerah, pembinaan LSM, Ormas dan OKP; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
VII	Non Urusan	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, akuntabilitas instansi pemerintah, dan kualitas pelaporan keuangan	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan kapasitas SD aparatur, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, sarana dan prasarana aparatur; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Gambaran Tentang Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian Kabupaten Ciamis Tahun 2018 dan proyeksi perekonomian Tahun 2019 serta analisis statistiknya dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah. Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2019 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Hal ini juga tidak terlepas dari perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial sebagai dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis program secara efektif dan efisien.

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global termasuk kebijakan MEA serta tantangan yang masih akan dihadapi, maka arah kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 adalah :

- a. Penguatan dan merintis pemantapan komoditi unggulan daerah yang mempunyai daya saing regional dan nasional.
- b. Penguatan iklim berusaha dan investasi.
- c. Penguatan promosi, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana investasi.
- d. Penguatan daya saing kelompok ekonomi produktif dan koperasi.

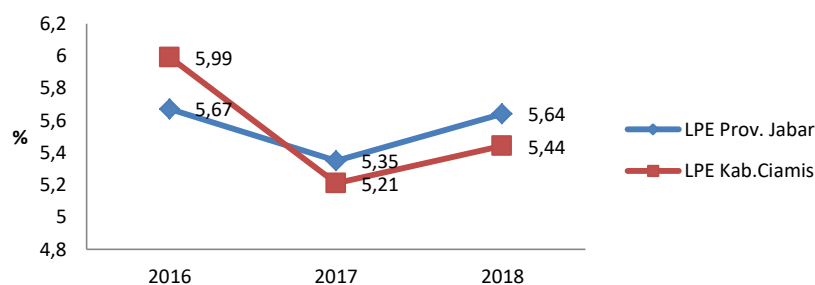
Arah kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), pemerataan PDRB perkapita, peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan jumlah investasi.

3.1.2 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Ciamis

Kualitas perkembangan suatu wilayah salah satunya dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Ciamis Tahun 2017 lebih rendah dibandingkan dengan LPE Provinsi Jawa Barat. Perkembangan LPE Kabupaten Ciamis pada Tahun 2016 sebesar 5,99% dan melambat pada Tahun 2017 menjadi sebesar 5,21% serta Tahun 2018 mengalami percepatan menjadi sebesar 5,44%. Sedangkan LPE Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 sebesar 5,67% dan sedikit melambat pada Tahun 2017 menjadi 5,35% serta mengalami percepatan pada Tahun 2018 menjadi sebesar 5,64%. Capaian LPE Kabupaten Ciamis dan LPE Provinsi Jawa Barat tersaji dalam grafik berikut:

Grafik 3.1
Capaian LPE Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016-2018



Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024 dan BPS Prov. Jabar

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis tertinggi Tahun 2018 berasal dari kategori Real Estate sebesar 9,62% kemudian kategori Konstruksi sebesar 9,25% serta kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 9,13%. Secara keseluruhan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis Tahun 2018 mengalami percepatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 5,21%. Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016-2018 selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Ciamis Capaian Tahun 2016-2017 dan Estimasi Tahun 2018 (%)

Kategori	Uraian	Tahun		
		2016	2017*)	2018**)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,99	2,21	2,31
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,71	0,13	2,99
C	Industri Pengolahan	6,74	5,18	7,14
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,04	2,07	8,77
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,97	7,12	5,00
F	Konstruksi	4,50	7,23	9,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,29	4,98	4,99
H	Transportasi dan Pergudangan	6,23	5,24	5,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,92	6,92	6,90
J	Informasi dan Komunikasi	12,92	11,81	9,13
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,99	2,89	4,05
L	Real Estate	5,02	9,26	9,62
M,N	Jasa Perusahaan	7,12	8,36	8,99
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,19	0,94	0,10
P	Jasa Pendidikan	6,10	8,57	5,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,60	8,35	8,09
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,48	9,63	6,71
PDRB		5,99	5,21	5,44

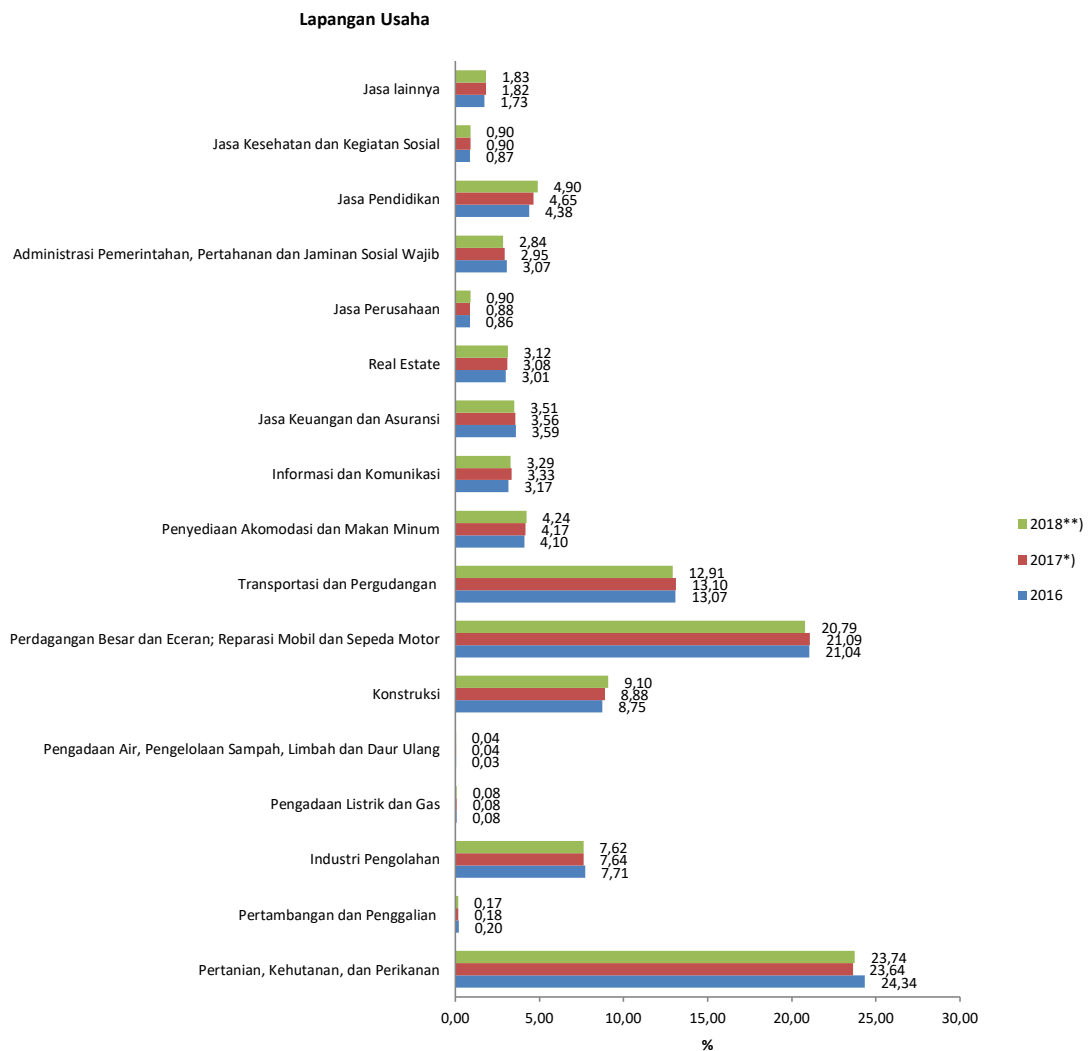
Sumber :BPS Kabupaten Ciamis *)Data Sementara **)Data Sangat Sementara

Kondisi ekonomi daerah dapat terlihat dari gambaran kondisi dan analisis data statistik perekonomian daerah, yang antara lain mencakup: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),

gini rasio, tingkat inflasi, sumbangan kategorial, dan indikator pembangunan daerah bidang ekonomi lainnya yang tersedia di daerah, baik pada Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018.

Nilai dan kontribusi berdasarkan lapangan usaha PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Berlaku capaian Tahun 2016-2018 seperti pada grafik berikut:

Grafik 3.2
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ciamis
Capaian Tahun 2016-2018 Menurut Kategori (AdHB)



Sumber :BPS Kabupaten Ciamis *)Data Sementara **)Data Sangat Sementara

Dari grafik tersebut terlihat bahwa dalam kurun waktu Tahun 2016-2018 capaian kontribusi kategori terbesar adalah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, sehingga masih merupakan kategori unggulan Kabupaten Ciamis. Kontribusi kategori terbesar kedua yaitu kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan berikutnya adalah kategori transportasi dan pergudangan.

Tabel berikut menyajikan PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Berlaku Capaian Tahun 2016-2018 menurut lapangan usaha.

Tabel 3.2
PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Berlaku
Capaian Tahun 2016-2018 Menurut Kategori (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	AdHB (Juta Rupiah)		
		2016	2017*)	2018**)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.970.068,7	6.275.293,9	6.914.875,5
B	Pertambangan dan Penggalian	50.112,9	48.669,0	50.303,7
C	Industri Pengolahan	1.890.569,2	2.027.492,5	2.221.217,7
D	Pengadaan Listrik dan Gas	18.545,6	21.558,9	23.737,8
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.394,3	9.836,1	10.771,7
F	Konstruksi	2.145.662,8	2.358.352,9	2.651.168,3
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.158.731,4	5.598.020,9	6.058.070,7
H	Transportasi dan Pergudangan	3.206.374,1	3.477.854,1	3.761.950,8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.005.105,6	1.108.003,1	1.234.668,1
J	Informasi dan Komunikasi	777.032,7	885.158,5	958.928,6
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	880.906,3	946.176,9	1.023.213,2
L	Real Estate	737.891,2	817.077,9	908.244,7
M,N	Jasa Perusahaan	210.440,9	232.282,7	262.427,7
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	752.602,6	782.598,5	827.014,0
P	Jasa Pendidikan	1.074.331,7	1.235.315,2	1.428.325,2
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	214.233,5	239.001,0	263.648,6
R,S,T,U	Jasa lainnya	423.447,8	481.785,1	534.165,5
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	24.524.451,4	26.544.477,0	29.132.731,8

Sumber :BPS Kabupaten Ciamis *)Data Sementara **)Data Sangat Sementara

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa PDRB Kabupaten Ciamis Atas dasar Harga Berlaku (AdHB) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2016 capaian PDRB AdHB sebesar Rp24,52 Trilyun, meningkat pada Tahun 2017 menjadi sebesar Rp26,54 Trilyun dan Tahun 2018 juga meningkat menjadi sebesar Rp29,13 Trilyun.

Gambaran Capaian PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2018 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Capaian PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2016-2018 (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	Tahun		
		2016	2017*)	2018**)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.075.074,1	4.165.067,8	4.261.100,0
B	Pertambangan dan Penggalian	38.177,9	38.228,5	39.370,9
C	Industri Pengolahan	1.477.353,3	1.553.859,2	1.664.729,9
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13.282,2	13.557,6	14.746,2
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.386,1	6.840,9	7.183,2

Kategori	Uraian	Tahun		
		2016	2017*)	2018**)
F	Konstruksi	1.732.764,8	1.857.993,7	2.029.803,6
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.187.447,3	4.396.181,5	4.615.621,2
H	Transportasi dan Pergudangan	2.245.125,2	2.362.848,8	2.498.027,2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	775.854,5	829.535,0	886.759,5
J	Informasi dan Komunikasi	782.919,0	875.396,6	955.362,1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	704.166,8	724.512,1	753.863,6
L	Real Estate	588.081,9	642.533,0	704.323,8
M,N	Jasa Perusahaan	169.079,4	183.217,3	199.693,9
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	670.885,4	677.214,9	677.877,4
P	Jasa Pendidikan	859.606,7	933.246,9	989.158,6
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	174.009,4	188.547,0	203.797,5
R,S,T,U	Jasa lainnya	344.759,5	377.967,1	403.329,1
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	18.844.973,5	19.826.747,9	20.904.747,6

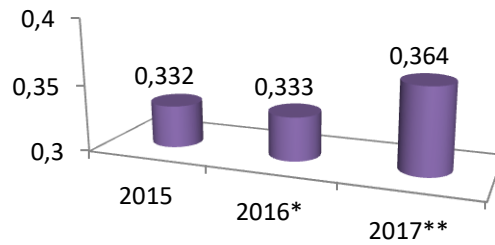
Sumber :BPS Kabupaten Ciamis *)Data Sementara **)Data Sangat Sementara

Kontribusi kategori PDRB Kabupaten Ciamis Atas dasar Harga Konstan terbesar Tahun 2018 yaitu kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang memberikan kontribusi sebesar 22,08%, kemudian kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 20,38% dan kategori transportasi dan pergudangan sebesar 11,95%. Capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ciamis Atas dasar Harga Konstan pada Tahun 2016 sebesar Rp18,84 Trilyun, meningkat Tahun 2017 menjadi Rp19,83 Trilyun dan Tahun 2018 menjadi sebesar Rp20,90 Trilyun.

PDRB Per Kapita Kabupaten Ciamis berdasarkan harga berlaku yang menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto per penduduk secara nominal capaiannya mampu meningkat dari Tahun 2016 yang mencapai Rp20,86 juta menjadi Rp22,46 juta pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 sebesar Rp24,51 juta. Begitu pula dengan PDRB Per Kapita Kabupaten Ciamis atas dasar harga konstan yang menggambarkan pendapatan riil penduduk Kabupaten Ciamis, capaian pada Tahun 2016 sebesar Rp16,03 juta dan pada Tahun 2017 sebesar Rp16,77 juta dan Tahun 2018 sebesar Rp17,59 juta.

Tingkat pemerataan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari pemerataan distribusi pendapatan yang sering diukur dengan koefisien gini dan persentase kemiskinan. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan yang ditentukan oleh Bank Dunia (*World Bank*) adalah $G < 0,40$ berarti ketimpangan rendah, antara $0,40 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi. Grafik berikut menunjukkan bahwa selama Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 kondisi gini rasio di Kabupaten Ciamis berada pada angka $< 0,40$ yang artinya memiliki tingkat ketimpangan rendah. Pada Tahun 2015 kondisi gini rasio di Kabupaten Ciamis memiliki tingkat ketimpangan 0,332; Tahun 2016 sebesar 0,333; dan pada Tahun 2017 sebesar 0,364.

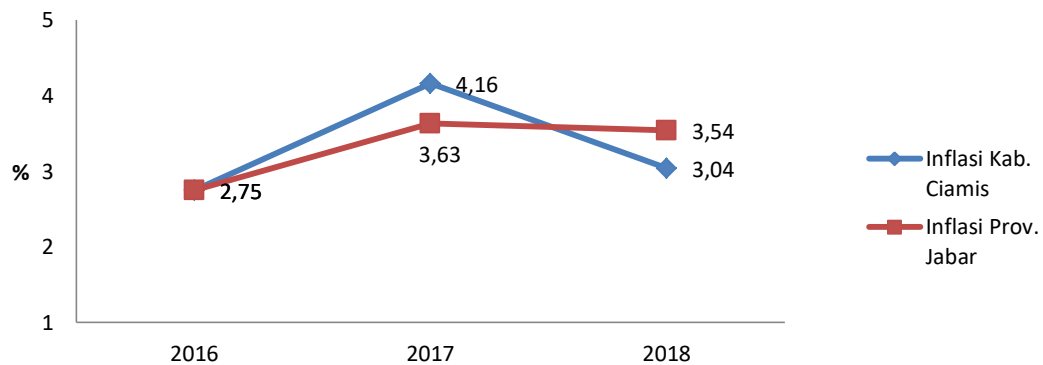
Grafik 3.3
Gini Rasio Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2017



Sumber: BPS Kabupaten Ciamis
*)Angka Sementara

Laju Inflasi Kabupaten Ciamis pada Tahun 2016 mencapai 2,75%, lebih rendah dibanding Tahun 2017 yang mencapai 4,16% dan 3,04% pada Tahun 2018. Laju inflasi Tahun 2016, 2017 dan Tahun 2018 tergolong inflasi ringan atau inflasi merayap (*creeping inflation*) yang masih wajar dan belum mengganggu perekonomian secara menyeluruh. Pada tahap inflasi ringan diyakini dapat mendorong peningkatan pendapatan nasional. Gambaran Laju inflasi Kabupaten Ciamis dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Barat adalah sebagaimana grafik 3.4 berikut :

Grafik 3.4
Laju Inflasi Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2018



Sumber: BPS Kabupaten Ciamis dan BPS Prov. Jabar

Sepanjang Tahun 2018 terjadi inflasi selama 9 (sembilan) bulan, sedangkan deflasi terjadi selama 3 (tiga) bulan. Inflasi tertinggi pada Bulan Januari yaitu sebesar 0,75%. Pemicu tinggi inflasi di Bulan Januari diantaranya karena terjadinya inflasi di kelompok bahan makanan terutama naiknya harga beras yang mencapai andil inflasi 0,546% dan beberapa komoditas kelompok perumahan diantaranya sewa rumah dengan andil inflasi 0,067% dan kontrak rumah dengan andil inflasi 0,033% serta komoditas bahan makanan daging ayam ras dengan andil inflasi 0,039%.

Pada Bulan Februari terjadi inflasi sebesar 0,50%, kelompok yang andil inflasinya tertinggi masih di kelompok bahan makanan dengan andil inflasi 0,234%. Tingginya andil inflasi

ini masih terkait dengan naiknya harga komoditas beras dengan andil inflasi 0,230% yang sempat langka sejak awal tahun 2018. Sedangkan pada Bulan Maret terjadi inflasi sebesar 0,11% dengan penyumbang inflasi dari kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,064%.

Pada Bulan April terjadi deflasi sebesar 0,06%, dimana kelompok yang memberikan andil deflasi masih berasal dari kelompok bahan makanan, kelompok sandang dan kelompok kesehatan dengan andil masing-masing kelompok sebesar 0,240%, 0,011% dan 0,006%.

Inflasi kembali terjadi pada Bulan Mei sebesar 0,48% dan yang memberikan andil inflasi berasal dari makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,395%. Kemudian pada Bulan Juni terjadi inflasi sebesar 0,78% dengan andil inflasi berasal dari kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan dengan andil inflasi sebesar 0,515% terutama di komoditas biaya angkutan dalam kota dan antar kota. Pada bulan ini bersamaan dengan adanya momen Hari Raya Idul Fitri, beberapa komoditas bahan makanan seperti daging ayam ras, cabai merah dan bawang merah ikut naik. Pada Bulan Juli, terjadi inflasi tipis sebesar 0,04% dan yang memberikan andil inflasi berasal dari makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,770%.

Deflasi kembali terjadi pada Bulan Agustus sebesar 0,16% dengan andil dari kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau dengan andil deflasi sebesar 0,232% dan 0,068%. Komoditas bahan makanan yang turun diantaranya beras, daging ayam ras, rokok kretek filter, cabai merah, minyak goreng, bawang merah dan telur ayam ras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Pada Bulan September juga terjadi deflasi sebesar 0,13% dengan andil deflasi dari kelompok bahan makanan sebesar 0,268%. Komoditas bahan makanan yang turun adalah minyak goreng, cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras, bawang merah, apel, daging ayam ras dan jeruk.

Inflasi kembali terjadi pada Bulan November sebesar 0,20% dengan andil dari kelompok bahan makanan sebesar 0,082%. Inflasi pada bulan ini dipicu naiknya inflasi di komoditas cabai merah dan telur ayam ras. Pada Bulan Desember terjadi inflasi sebesar 0,19% dengan andil dari kelompok bahan makanan sebesar 0,415%. Inflasi pada bulan ini juga didongkrak oleh naiknya harga beras, daging ayam ras dan telur ayam ras.

Inflasi tahunan, selama tahun 2018 yaitu sebesar 3,04%. Inflasi tahunan ini lebih besar dibandingkan inflasi kota terdekat yaitu Kota Tasikmalaya yang hanya mencapai 2,30% serta dibawah angka inflasi gabungan 7 Kota IHK di Jawa Barat sebesar 3,54% namun lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 3,13%

Fenomena fluktuasi kenaikan harga komoditas bahan kebutuhan pokok sepanjang tahun 2018 adalah hal yang lumrah terjadi seiring dengan hukum ekonomi yang berlaku di pasar terutama menyangkut kebutuhan bahan makanan pokok seperti beras, minyak goreng, tepung terigu, gula pasir, daging ayam, telur dan lainnya. Keadaan tersebut akan sangat mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Jika komoditas barang-barang semakin mahal sementara pendapatan rumah tangga tidak meningkat, maka

daya beli masyarakat akan cenderung menurun dan imbasnya adalah tingkat kesejahteraan akan sulit ditingkatkan.

Diperlukan kontrol perubahan harga komoditas bahan kebutuhan pokok yang lebih kuat dari pemerintah daerah, agar lebih mudah mendeteksi kelangkaan pasokan dan dipersiapkan langkah dan strategi untuk mengatasinya agar masyarakat tetap terjamin kebutuhan pokok hidupnya. Melakukan kegiatan “operasi pasar” secara berkala untuk beberapa jenis komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat atau nilai konsumsinya tinggi sehingga mampu menekan angka inflasi. Adanya program raskin juga secara langsung berdampak terhadap turunnya angka inflasi khususnya untuk komoditas beras meskipun sesaat. Melibatkan unsur asosiasi pengusaha yang dominan di Kabupaten Ciamis misalnya asosiasi pengusaha daging ayam ras atau pengusaha telur ayam ras dalam upaya pengendalian pasokan dan tingkat harga dapat menjadi bagian dari solusi pengendalian inflasi.

Upaya pengendalian inflasi juga dilakukan dengan meningkatkan dan mengoptimalkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang bersifat lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan *stakeholder* (pemangku kepentingan), sebagai pemberi bahan kajian dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menyikapi perkembangan fluktuasi harga terkini dan langkah-langkah strategis yang diperlukan. Selain itu, menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan strategis berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah sesuai dengan pola musimannya dengan melakukan koordinasi antar pemerintah daerah wilayah perbatasan. Menjamin kelancaran distribusi pasokan pangan dari sentra produksi pangan ke tempat-tempat yang memerlukannya dan pasokan ini tidak boleh terhambat masalah cuaca yang selama ini dijadikan alasan. Kemudian melakukan upaya-upaya menurunkan inflasi pangan dengan membuka keran impor bahan pangan jika pasokan dalam negeri diperkirakan tidak akan mencukupi serta meredam dampak depresiasi nilai tukar rupiah terhadap kenaikan harga barang-barang pada umumnya melalui kebijakan Bank Indonesia (BI).

Gambaran kondisi sosial ekonomi lainnya di Kabupaten Ciamis dapat dilihat diantaranya berdasarkan indikator ketenagakerjaan dan kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Ciamis Tahun 2016 yaitu sebesar 6,95%, pada Tahun 2017 menurun menjadi sebesar 5,17% pada Tahun 2018 dan menjadi sebesar 4,60%. Tingkat pengangguran ini selaras dengan tingkat kesempatan kerja sebesar 93,05 pada Tahun 2016 dan menjadi sebesar 94,83 pada Tahun 2017 serta meningkat pada Tahun 2018 menjadi sebesar 95,40%. Upah Minimum Kabupaten (UMK) Ciamis terus mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti dalam tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Indikator Ketenagakerjaan dan Kemiskinan
di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2018

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2016	2017	2018	
1	Penduduk miskin				
	- Jumlah	98.770	96.760	85.720	Orang
	- Persentase	8,42	8,20	7,22	Persen

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2016	2017	2018	
2	Angkatan Kerja	543.369	634.932	612.055	Orang
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,95	5,17	4,60	Persen
4	Tingkat Kesempatan Kerja	93,05	94,83	95,40	Persen
5	Upah Minimum Kabupaten*	1.363.319	1.475.792	1.604.334	Rp.

Sumber: BPS Kab. Ciamis dan *) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis

Gambaran tingkat kemiskinan di Kabupaten Ciamis dapat digunakan untuk mengukur kemajuan pengembangan wilayah menggunakan angka kemiskinan agregat, atau yang sering disebut angka kemiskinan makro. Perhitungan kemiskinan yang digunakan adalah pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, artinya kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa selama kurun waktu tiga tahun terakhir, persentase dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ciamis mengalami penurunan. Rata-rata penurunan persentase penduduk miskin selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar 0,6%. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Ciamis mengindikasikan masih perlunya penerapan program-program kemiskinan yang lebih luas serta berkelanjutan sehingga angka kemiskinan dapat diturunkan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Ciamis salah satunya didukung oleh program inovasi daerah yaitu melalui penyaluran Kartu Waluya, Walagri dan Calakan sebagai pendampingan program Pusat dimana setiap tahunnya disalurkan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan.

3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020

Perkembangan perekonomian Kabupaten Ciamis baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh fenomena-fenomena yang berkembang saat ini dan yang akan datang, baik tataran global, nasional, lingkungan regional Jawa Barat, maupun lingkungan Kabupaten Ciamis sendiri.

3.1.3.1 Tantangan Perekonomian Daerah

a. Tantangan Global dan Nasional

Pada tahun 2020, perekonomian Indonesia masih akan dihadapkan pada berbagai tantangan dan risiko, baik dari global maupun domestik. Tantangan ekonomi global antara lain:

- Pertumbuhan ekonomi dunia yang masih relatif rendah, sebesar 3,6% pada tahun 2020. Masih relatif lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan menyebabkan stagnannya pertumbuhan volume perdagangan dunia dan harga komoditas internasional pada tahun 2020.
- Ketidakpastian perang dagang yang dapat mendorong investasi yang lebih rendah, gangguan pada *supply chain*, dan lambatnya pertumbuhan produktivitas pada tingkat global.
- Meningkatnya sentimen negatif di pasar keuangan global. Selain isu perang dagang, beberapa faktor lain seperti volatilitas ekonomi di beberapa negara berkembang, kebijakan fiskal di Italia, tidak tercapainya kesepakatan Brexit, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi China dapat memicu meningkatnya sentimen negatif investor kedepan.
- Harga komoditas ekspor utama cenderung stagnan. Harga minyak sawit akan dipengaruhi pasokan yang masih berlebih di pasar dunia seiring dengan turunnya permintaan dari Uni Eropa yang mulai beralih ke minyak biji bunga matahari dan penerapan tarif terhadap minyak sawit oleh India. Harga batu bara juga dipengaruhi konsumsi batu bara yang diperkirakan akan berkurang sebagai dampak kebijakan berbagai negara untuk menggunakan sumber energi yang lebih bersih.

Sementara di tingkat domestik, perekonomian juga masih dihadapkan tantangan dan risiko, baik yang sifatnya jangka pendek maupun menengah, antara lain:

- Pertumbuhan ekonomi yang stagnan;
- Defisit transaksi berjalan yang meningkat;
- Tahun transisi pemerintahan;
- Kebijakan moneter dan likuiditas perbankan yang ketat.

Sasaran dan Kebijakan Ekonomi makro

Kondisi makro ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi di Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019 dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi. Sasaran ekonomi makro untuk tahun 2020, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5
Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2020

No.	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
	Perkiraan Besar-besaran Pokok			
1	Pertumbuhan PDB (%)	5,2	5,3	5,3-5,6
2	Laju Inflasi, IHK (%): Akhir Periode	3,13	2,5-4,5	2,0-4,0
3	Nilai Tukar Nominal (Rp/USD): Rata-rata	14.247	15.000	14.000-15.000
	Neraca Pembayaran			
1	Pertumbuhan Ekspor Non Migas	6,4	8,0	7,8-9,7
2	Pertumbuhan Impor Non Migas	19,5	11,0	10,5-12,3

No.	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
3	Cadangan Devisa (USD miliar)	120,7	125,5-127,8	124,8-130,6
	- dalam bulan impor (termasuk utang LN Pemerintah)	6,5	6,6-6,8	6,1-6,2
4	Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	3,0	2,5-2,7	2,2-2,5
	Keuangan Negara			
1	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,3	11,1	10,60-11,20
2	Belanja Modal (% PDB)	1,25	1,18	1,43-1,58
3	Subsidi Energi (% PDB)	1,1	0,99	0,82-0,83
4	Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,01)	(0,13)	0,00-0,23
5	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(1,76)	(1,84)	(1,75)-(1,52)
6	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	29,98	30	29,40-30,10
	Investasi			
1	Peringkat Indonesia pada EODB	73	Menuju 40	Menuju 40
2	Pertumbuhan Investasi (PMTB)(%)	6,7	7	7,0-7,4
3	Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	721,3	833,0-870,0	875,1-890,3
	Target Pembangunan			
1	Tingkat Kemiskinan (%)	9,8	8,5-9,5	8,5-9,0
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3	4,8-5,2	4,8-5,1
3	Rasio Gini (Nilai)	0,389	0,380-0,385	0,375-0,380
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Nilai)	71,39	71,98	72,51

Sumber : Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang RKP Tahun 2020

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,6 persen pada Tahun 2020, kebijakan perlu diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan potensial. Upaya peningkatan pertumbuhan potensial dapat dilakukan melalui reformasi struktural berupa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, perbaikan regulasi dan institusi, dan pendalaman pasar keuangan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi secara umum akan didorong, baik dari sisi lapangan usaha maupun sisi pengeluaran.

Dari sisi lapangan usaha, pencapaian pertumbuhan ekonomi akan didorong utamanya oleh industri pengolahan yang diharapkan mampu tumbuh 5,0–5,5 persen pada Tahun 2020. Upaya tersebut dapat dicapai melalui revitalisasi industri pengolahan utamanya melalui perbaikan berbagai aspek iklim usaha (*enabling environment*) yang mendukung pengembangan industri dan penguatan rantai pasok/nilai termasuk dengan pemanfaatan industri 4.0. Sektor pertanian diharapkan tumbuh 3,8–3,9 persen, melalui modernisasi pertanian dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Pertumbuhan sektor pertambangan sebesar 1,9–2,0 persen didukung oleh peningkatan nilai tambah pertambangan yang mendukung pengembangan industri hilir.

Dari sisi pengeluaran, pencapaian pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 akan didorong oleh pertumbuhan investasi yang mencapai 7,0–7,4 persen. Untuk mencapai target tersebut, investasi asing maupun dalam negeri akan didorong melalui peninjauan kembali daftar negatif investasi, fasilitasi dan promosi investasi, termasuk upaya meningkatkan peringkat EODB Indonesia dari posisinya saat ini. Peningkatan investasi juga didorong oleh peningkatan

investasi pemerintah, termasuk BUMN, terutama untuk infrastruktur. Peningkatan investasi akan ditujukan pada peningkatan produktivitas, yang akan mendorong peningkatan efisiensi investasi.

b. Tantangan dan Prospek Regional Jawa Barat

Terdapat sejumlah aspek yang patut dipertimbangkan dalam membahas tantangan dan prospek regional Jawa Barat. Pertama, mencermati respon pemerintah terhadap tantangan global dan Nasional. Memperhatikan perkembangan perekonomian global diwarnai ketidakpastian yang besar dan tantangan yang dihadapi, pemerintah merasa penting mengarahkan kebijakan untuk mengoptimalkan berbagai potensi domestik dalam rangka memperkuat resiliensi (ketahanan) perekonomian Nasional. Di sektor domestik, perlu terus dibangun industri yang kuat dan berdaya saing di rumah sendiri. Sementara dari sektor eksternal, perlu disiapkan berbagai sektor unggulan yang berdaya saing di pasar global sekaligus mempunyai produktivitas tinggi. Setidaknya terdapat 3 (tiga) potensi ekonomi yang perlu dioptimalkan untuk menopang ketahanan ekonomi Nasional. Potensi pertama adalah kepercayaan dan keyakinan yang tinggi dari pelaku ekonomi terhadap pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Kedisiplinan pengelolaan kebijakan makroekonomi, terutama pengelolaan kebijakan fiskal yang bervisi jangka menengah panjang dan kebijakan moneter yang berkomitmen menjaga stabilitas makro ekonomi, serta kontinuitas berbagai kebijakan reformasi struktural pemerintah yang telah dilakukan selama ini menjadi faktor-faktor penopang utama bagi keyakinan para pelaku ekonomi. Potensi kedua adalah teknologi digital yang berkembang pesat. Hal ini terlihat dari kegiatan *sharing economy* dan *digital economy* yang meningkat pesat sebagaimana tercermin dari aktivitas *fintech (financial technology)* dan *ecommerce*. Perkembangan positif ini bila dimanfaatkan dengan tepat akan dapat meningkatkan efisiensi dan mendukung kegiatan ekonomi domestik. Potensi-potensi ekonomi tersebut, apabila dapat diberdayakan dengan efektif dan optimal, akan semakin memperkuat dan menggandakan manfaat dari potensi sumber daya domestik yang sebelumnya sudah ada, yakni sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dalam kaitan ini pula, bonus demografi yang direpresentasikan dengan populasi penduduk usia produktif yang lebih besar dari penduduk usia lanjut dan anak-anak akan menjadi potensi dari sisi tenaga kerja, sekaligus basis konsumen yang kuat sejalan dengan meningkatnya kelas menengah di Indonesia. Bonus demografi ini jika dikelola dengan tepat akan memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menjadi lebih sejahtera. Ketiga terkait belanja infrastruktur. Proyek infrastruktur yang akan dikembangkan adalah: (1) jalan, (2) Jembatan, (3) Bandara, (4) Pelabuhan Laut, (5) Rel Kereta Api, dan (6) Terminal Bus. Arah belanja tersebut disertai dengan reformasi fiskal, institusional, dan regulasi. Bahkan Pemerintah Pusat akan melakukan relokasi belanja subsidi dan infrastruktur pada Tahun 2020 mendatang. Penurunan subsidi akan direlokasi untuk kebutuhan belanja infrastruktur yang memiliki multiplier besar terhadap perekonomian, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,4–5,8 persen.

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Jawa Barat tahun ini diantaranya di dukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, Nasional serta internasional.

Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di Tahun 2020, sehingga hal tersebut dapat mendorong kinerja PMTB menjadi lebih baik.

Tantangan dan prospek demikian akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen PDRB baik sisi produksi maupun penggunaan, maka diperkirakan besaran indikator pembangunan ekonomi disajikan pada Tabel berikut.

Tabel. 3.6
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2019-2020

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Tahun		Satuan
		2019	2020	
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,4-71,9	71,91-72,52	Poin
2	LPE	5,4-5,7	5,4-5,7	Persen
3	TPT	7,8-8,1	8,00-7,90	Persen
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,0-7,9	7,9-7,7	Persen
4	Inflasi	3,8-4,0	3,5-4,00	Persen
5	Kemiskinan	8,1-8,4	7,8-7,3	Persen
	Persentase Penduduk Miskin	6,66-6,90	6,07-6,31	Persen
6	Gini Rasio	0,400-0,401	0,39-0,40	
	Gini Rasio	0,38-0,39	0,37-0,38	
7	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,50	1,48	Persen

Sumber: RPJMD Jawa Barat 2013–2018 dan *outlook* tim ekonomi Jabar

Berdasarkan perkembangan indikator pembangunan ekonomi Jawa Barat Tahun 2019 maka dapat diproyeksikan bahwa pada Tahun 2020 ekonomi Jawa Barat mampu tumbuh hingga 5,4–5,7 persen. Hal tersebut dapat terwujud dengan asumsi tidak ada perubahan drastis dan optimis.

Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi sebagaimana yang diproyeksikan di atas, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi adalah berikut ini: a. Strategi meningkatkan kontribusi Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perikanan terhadap PDRB, penciptaan kesempatan kerja dan penurunan kemiskinan, dengan arah kebijakan: Menjaga ketersediaan dan keterjangkauan 9 kelompok pangan terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah di kabupaten/kota yang memiliki laju penurunan skor Pola Pangan Harapan ketersediaan. b. Strategi mempertahankan konsumsi energi 2,150 kkal/kap/hr dan ketersediaan energi 2,400 kkal/kap/hr c. Strategi peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat, dengan arah kebijakan: fokus pada perbaikan di bidang industri dan pertanian, dengan mempertahankan capaian kinerja di sektor perdagangan d. Strategi memantapkan peran lapangan usaha perdagangan, transportasi dan pergudangan serta jasa lainnya, dengan arah kebijakan mendorong peningkatan nilai tambah di usaha perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta jasa lainnya. e. Strategi membangkitkan lapangan industri pengolahan di Jawa Barat-sebagai sektor dengan kontribusi terbesar-khususnya upaya-upaya untuk

meningkatkan pertumbuhan sektoral industri pengolahan, dengan arah kebijakan: mengupayakan perluasan pangsa pasar ekspor (melalui peran market intelegent dan juga market penetration, dan juga peningkatan efisiensi produksi dan produktivitas tenaga kerja. f. Strategi meningkatkan daya saing lapangan usaha konstruksi - melalui pembangunan infrastruktur dengan arah kebijakan : (1) Fokus pada peningkatan aksesibilitas seluruh daerah di Jawa Barat; (2) Pengembangan Jasa Keuangan dan Asuransi untuk mendukung terwujudnya program financial inclusion di Jawa Barat; serta (3) Peningkatan daya saing pendidikan dan kesehatan dengan sasaran peningkatan kualitas SDM. g. Strategi Membangkitkan kembali lapangan usaha pertanian, untuk menjadi stabilitas kesempatan kerja, dengan arah kebijakan : (1) Meningkatkan laju pertumbuhan nilai tambah yang bisa dilakukan dengan peningkatan produktivitas melalui penciptaan bibit unggul, teknologi tepat guna dan juga memberikan perlindungan kepada petani melalui subsidi untuk asuransi pertanian; (2) Meningkatkan aktivitas pasca panen, melalui upaya mendorong dan pengembangan industri industri mikro, kecil dan menengah pengolah hasil pertanian, (3) pemberian insentif kepada aktivitas industri pengolah hasil pertanian, misalnya aksesibilitas modal bagi pengusaha mikro dan kecil yang diwujudkan bersamaan dengan program *financial inclusion*.

c. Tantangan Kabupaten Ciamis

Adapun tantangan yang dihadapi Kabupaten Ciamis dikaitkan dengan kondisi ekonomi daerah adalah:

1. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang belum optimal, dimana perekonomian daerah Kabupaten Ciamis mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 5,99% pada tahun 2016, 5,21% pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 5,44% atau mencapai rata-rata pertumbuhan sebesar 5,55% per tahun. Jika dilihat dari potensi dan peluang yang dimiliki, pertumbuhan tersebut dinilai cukup baik tetapi belum optimal. Akar dari permasalahan tersebut antara lain bahwa perekonomian daerah belum secara optimal dibangun dari usaha-usaha ekonomi rakyat (ekonomi kerakyatan) berdasarkan potensi yang tersedia. Ekonomi kerakyatan secara riil dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Program-program pembangunan ekonomi selama ini belum fokus, sehingga kurang dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi. Sinergitas dalam pembangunan ekonomi juga masih lemah (antar sektor, antar sumberdaya, antar wilayah. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur belum memadai serta sarana dan prasarana perekonomian belum dimanfaatkan secara optimal.
2. Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta kategori transportasi dan pergudangan, merupakan tiga lapangan usaha yang memiliki kontribusi tertinggi dalam perekonomian Kabupaten Ciamis. Hampir separuh PDRB Kabupaten Ciamis bersumber dari ketiga kategori tersebut, sehingga perlu perhatian lebih serius.
3. Laju pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada Tahun 2019 diperkirakan mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan Tahun 2018, dengan

terlaksananya program-program unggulan pertanian terpadu, peningkatan sarana dan prasarana dan peningkatan kinerja penyuluh pertanian. Namun demikian, terdapat fenomena yang harus direspon terkait dengan perubahan iklim yang mendorong perubahan cuaca, mengingat aktivitas budidaya pada sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh cuaca dan antisipasi kemungkinan adanya kenaikan harga pupuk akibat pengurangan subsidi.

3.1.3.2 Prospek Perekonomian Daerah

Prediksi pertumbuhan ekonomi makro Kabupaten Ciamis yang mencapai 5% atau lebih, bukan merupakan suatu hal yang mustahil apabila potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Ciamis dapat dioptimalkan dan disertai dengan tata kelola ekonomi yang baik. Pencapaian kearah prediksi ekonomi makro yang optimis, tentunya menjadi tantangan ke depan yang harus disikapi oleh pemerintah daerah dengan cara melakukan terobosan-terobosan/inovasi-inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah, misalnya dengan cara pendekatan pembangunan industri wilayah untuk mencapai daya saing daerah melalui pencapaian skala ekonomis. Perkiraan indikator pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2020 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Perkiraan Indikator Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2020

No.	Indikator	Proyeksi Tahun		Satuan
		2019	2020	
1.	a. Jumlah Penduduk	1.195.176	1.201.685	Jiwa *)
	b. Laju Pertumbuhan Penduduk	0,562	0,561	Persen
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,40-5,70	5,45-5,75	Persen
3.	Nilai PDRB perkapita AdHB	25,70	27,35	Rp. Juta
4.	Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk	7,10	7,00	Persen
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,50	4,30	Persen

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kab. Ciamis Taun 2019-2024

Analisis Kependudukan Kab. Ciamis Tahun 2015-2025*

Proyeksi jumlah penduduk pertengahan tahun Kabupaten Ciamis Tahun 2019 sebanyak 1.195.176 jiwa dan Tahun 2020 diperkirakan meningkat menjadi sebanyak 1.201.685 jiwa dengan perkiraan laju pertumbuhan penduduk Tahun 2019 sebesar 0,562% dan tahun 2020 sebesar 0,561%.

Persentase penduduk miskin Tahun 2019 diproyeksikan sebesar 7,10% dan Tahun 2020 diproyeksikan sebesar 7,00%. Sejalan dengan penurunan angka kemiskinan, diproyeksikan untuk tingkat pengangguran terbuka juga diharapkan semakin berkurang, Tahun 2019 diproyeksikan sebesar 4,50% dan Tahun 2020 sebesar 4,30%.

Untuk perkiraan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2019 sebesar 5,40-5,70% dan tahun 2020 diproyeksikan sebesar 5,45-5,75%. PDRB Per Kapita Atas dasar Harga Berlaku

Tahun Dasar 2010 diperkirakan sebesar Rp25,70 juta pada Tahun 2019 dan sebesar Rp27,35 juta pada tahun 2020.

Bila dilihat dari kontribusinya, perekonomian Kabupaten Ciamis masih ditopang oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor Transportasi dan Perdagangan.

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan penggerak pembangunan, baik dari segi penyedia bahan baku, kesempatan kerja, bahan pangan serta sebagai daya beli bagi produk yang dihasilkan oleh sektor lain. Demikian pula dengan Kabupaten Ciamis yang merupakan salah satu kabupaten dimana pertanian masih menjadi penggerak roda perekonomian, sehingga pengaruhnya terhadap laju pertumbuhan ekonomi sangat signifikan. Salah satu bentuk *'concern'* Kabupaten Ciamis terhadap pengembangan sektor pertanian adalah dengan adanya rencana pengembangan Kawasan Strategis Kawasan Agropolitan dan Lumbung Padi.

Selama lima tahun terakhir volume APBD Kabupaten Ciamis terus meningkat secara nyata. Namun demikian kita masih dihadapkan pada kurangnya fasilitasi pendanaan melalui APBD dibandingkan dengan kebutuhan yang didasarkan pada aspirasi dan tuntutan masyarakat. Keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Untuk itu, perlu dilakukan inovasi melalui sumber pembiayaan lainnya selain APBD, seperti CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini dan tantangan serta prospek perkonomian mendatang maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2020 adalah Menata ulang pembangunan ekonomi melalui penguatan sinergitas antar sektor pembangunan, antar sumberdaya, antar kawasan dan antar pelaku ekonomi yang difokuskan pada pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan (Sentra) yang berbasis potensi unggulan (komoditas unggulan) sesuai dengan tata ruang wilayah yang didukung sumberdaya manusia yang berkualitas, ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana perekonomian yang memadai, serta birokrasi yang lebih profesional dan berkinerja tinggi dengan menitik beratkan pada pengembangan ekonomi kerakyatan yang memanfaatkan potensi sumberdaya unggulan lokal secara optimal.

Bedasarkan permasalahan serta arah kebijakan pembangunan daerah maka isu strategis Kabupaten Ciamis yang disinkronisasi dengan isu-isu strategis internasional, nasional dan regional, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kesempatan pendidikan.
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
3. Peningkatan daya beli masyarakat.
4. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.
5. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur.
6. Peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.

7. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana alam.
8. Peningkatan kapasitas keuangan daerah.
9. Pemberdayaan masyarakat dan desa.
10. Peningkatan pengembangan kawasan pertumbuhan.
11. Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2019 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Tahun 2014-2019 di tahun kelima, perlu didukung dengan kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu pendukung strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber- sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menganut azas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, bahwa pendanaan penyelenggaraan pemerintahan diatur sesuai dengan kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan.

Berdasarkan hasil analisis dan realisasi sumber-sumber pendanaan daerah pada Tahun 2018, selanjutnya dirumuskan kebijakan keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, sehingga perlu dilakukan perubahan.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus berupa Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya.

Perencanaan pendapatan daerah pada perubahan Tahun 2019 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

- a. Pendapatan diasumsikan naik sebesar 14,65% dari proyeksi Tahun 2019, terutama dari lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- b. Pendapatan asli daerah naik sebesar 1,16% dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
- c. Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak diasumsikan naik 0,14%.
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diasumsikan mengalami peningkatan sebesar 98,98% yaitu dari bagi hasil pajak dan bukan pajak dari provinsi dan dari bantuan keuangan dari Provinsi sebesar Rp.346.106.310.600.

Adapun anggaran dan asumsi perubahan pendapatan daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8

Kondisi Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran Tahun 2019	Perubahan Anggaran Tahun 2019	Bertambah /Berkurang	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	2.439.009.615.700	2.796.426.051.300	357.416.435.600	14,65
1.1	Pendapatan asli daerah	238.094.914.700	240.847.177.700	2.752.263.000	1,16
1.1.1	Pajak daerah	63.500.000.000	65.159.624.000	1.659.624.000	2,61
1.1.2	Retribusi daerah	8.719.272.000	8.804.611.000	85.339.000	0,98
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.700.000.000	3.700.000.000	-	-
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	162.175.642.700	163.182.942.700	1.007.300.000	0,62
1.2	Dana perimbangan	1.845.286.827.000	1.847.961.324.000	2.674.497.000	0,14
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	67.114.285.000	69.788.782.000	2.674.497.000	3,98
1.2.2	Dana alokasi umum	1.228.672.016.000	1.228.672.016.000	-	-
1.2.3	Dana alokasi khusus	549.500.526.000	549.500.526.000	-	-
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	355.627.874.000	707.617.549.600	351.989.675.600	98,98
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	80.396.000.000	86.279.365.000	5.883.365.000	7,32
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	275.231.874.000	275.231.874.000	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	-	346.106.310.600	346.106.310.600	100,00

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Ciamis, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
3. Pendayagunaan Barang Milik Daerah;
4. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya; dan
5. Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dan menghambat investasi.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan belanja daerah pada perubahan anggaran Tahun 2019 dihitung dengan asumsi sebagai berikut

- a. Proyeksi belanja daerah diasumsikan naik sebesar 14,66% dari anggaran murni Tahun 2019;

- b. Perhitungan gaji menggunakan basis data Tahun 2018 dengan *acress* 2,5%.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah masih diarahkan sebagai berikut :

- a. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan DAU dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya.
- e. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial dan kegiatan-kegiatan yang mendesak.
- f. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.
- g. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung program diutamakan untuk membiayai 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Tahun 2019.
- h. Dukungan terhadap program/kegiatan strategis provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

Adapun anggaran dan proyeksi perubahan belanja daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9
Kondisi Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran Tahun 2019	Perubahan Anggaran Tahun 2019	Bertambah /Berkurang	%
1	2	3	4	5	6
2	BELANJA DAERAH	2.438.453.070.820	2.795.869.506.420	357.416.435.600	14,66
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.709.981.859.344	1.719.606.687.344	9.624.828.000	0,56
2.1.1	Belanja pegawai	1.155.265.106.244	1.155.265.106.244	-	-
2.1.4	Belanja hibah	94.014.600.000	94.024.800.000	10.200.000	0,01
2.1.5	Belanja bantuan sosial	5.095.000.000	7.720.000.000	2.625.000.000	51,52
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa	8.100.000.000	8.100.000.000	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa	435.007.153.100	442.642.781.100	7.635.628.000	1,76
5.1.8	Belanja tidak terduga	12.500.000.000	11.854.000.000	(646.000.000)	(5,17)
2.2	Belanja Langsung	728.471.211.476	1.076.262.819.076	347.791.607.600	47,74
2.2.1	Belanja pegawai	69.348.398.135	69.521.273.135	172.875.000	0,25
2.2.2	Belanja barang dan jasa	367.935.046.166	445.565.451.766	77.630.405.600	21,10
2.2.3	Belanja modal	291.187.767.175	561.176.094.175	269.988.327.000	92,72

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Perencanaan pembiayaan daerah pada perubahan anggaran Tahun 2019 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

- a. Proyeksi pembiayaan daerah di perubahan APBD Tahun 2019 diasumsikan tetap dari anggaran murni Tahun 2019.
- b. Proyeksi penyertaan modal (investasi) daerah diasumsikan tetap dikarenakan penyertaan modal ke PDAM, BJB dan BPR sudah memenuhi target.

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran 2018, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengeluaran pembiayaan diarahkan yaitu untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah dan penyediaan fasilitas kredit bagi pelaku KUKM serta pembayaran pokok utang. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2019 di Kabupaten Ciamis antara lain diarahkan untuk :

- a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu;
- b. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian (prudential).

Adapun anggaran dan proyeksi perubahan pembiayaan daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Kondisi Pembiayaan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran Tahun 2019	Perubahan Anggaran Tahun 2019	Bertambah /Berkurang	%
1	2	3	4	5	6
3.1	Penerimaan pembiayaan	48.999.788.920	48.999.788.920	-	-
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	48.999.788.920	48.999.788.920	-	-
3.2	Pengeluaran pembiayaan	49.556.333.800	49.556.333.800	-	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	13.500.000.000	13.500.000.000	-	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang	512.500.000	512.500.000	-	-
3.2.9	Pembayaran Utang Pihak Ketiga	30.543.833.800	30.543.833.800	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	(556.544.880)	(556.544.880)	-	-

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2019 disusun dengan mengacu pada pencapaian target Tahun 2018 yang merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 dan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025. Penyusunan prioritas daerah Tahun 2019 dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan Tahun 2018 dan proyeksi pencapaian kinerja Tahun 2019, masalah dan tantangan pembangunan yang merujuk pada prioritas pembangunan nasional, serta prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2019 tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019. RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2019 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 dalam rangka mewujudkan Visi jangka menengah Kabupaten Ciamis yaitu :

“ Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2019”

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

- Maju Berkualitas** : Bahwa pembangunan Kabupaten Ciamis yang saat ini telah memberikan perubahan ke tingkat kemajuan berdasarkan perkembangan indikator makro pembangunan, diperlukan penguatan agar tidak hanya sekedar kemajuan melainkan kemajuan yang lebih berkualitas. Oleh karenanya pembangunan daerah kedepan harus dirancang sedemikian rupa sehingga secara efektif harus berdampak terhadap pertumbuhan yang tinggi, percepatan penanggulangan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan berusaha dengan tetap menjaga dan memelihara kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup guna pembangunan berkelanjutan. Hasil-hasil pembangunan juga tidak hanya sekedar kuantitas tetapi ke depan lebih ditekankan pada kualitas.
- Kemandirian** : Kabupaten Ciamis ke depan harus diarahkan untuk dapat mendayagunakan segenap potensi yang dimiliki guna terwujudnya kemandirian, baik kemandirian sosial, politik maupun ekonomi.

Dalam mewujudkan Visi tersebut dilakukan upaya-upaya yang dirumuskan melalui Misi. Dalam rangka pelaksanaan Misi maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi tersebut menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan

daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1.

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

VISI		
Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2019		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi Pertama, Meningkatkan Kualias Sumber Daya Manusia	Membangun sumber daya manusia yang terdidik	Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas Meningkatnya budaya dan minat baca
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya layanan kesehatan Meningkatnya kesehatan lingkungan
	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk
	Meningkatkannya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan Meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan
	Meningkatkan prestasi olahraga serta pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah	Meningkatnya prestasi olahraga Pengembangan dan penguatan nilai budaya yang berkembang di masyarakat
	Meningkatkan kerukunan hidup beragama	Pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari Mewujudkan harmonisasi dan kerukunan antar kelompok masyarakat, inter umat beragama maupun antar umat beragama serta pengembangan toleransi terhadap keragaman agama
	Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial	Menurunnya tingkat kemiskinan Terlindunginya perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan Menurunnya PMKS
	Misi Kedua, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat	Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah
Meningkatkan pelayanan publik		Meningkatnya transparansi. Meningkatnya pelayanan masyarakat. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan
Meningkatnya kesadaran politik dan demokrasi		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik
Meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta stabilitas keamanan dan ketertiban umum		Meningkatnya Kesadaran Hukum masyarakat Terciptanya supremasi hukum dan perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM) Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
Meningkatkan hubungan kerjasama kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha (perindustrian dan perdagangan) dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan pembangunan daerah		Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dunia usaha dan perguruan tinggi
Misi Ketiga, Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		Menyediakan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya serta meningkatkan kelestarian lingkungan hidup
	Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air	
	Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	
	Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi, ketenagalistrikan dan pembinaan usaha tambang	
	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	
	Meningkatnya RTH yang dikelola Pemerintah	
	Meningkatakan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat	
Misi Keempat, Membangun perekonomian daerah yang tangguh	Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah	Meningkatnya peran koperasi, UMKM dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat
		Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal
		Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah
		Terwujudnya sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi unggulan lokal
		Meningkatnya kualitas sarana prasarana perekonomian masyarakat
Meningkatkan daya beli	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya	

	masyarakat	disparitas pendapatan
	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan	Terjaminnya lahan pertanian berkelanjutan Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian , peternakan, perikanan dan kehutanan Berkembangnya berbagai aktivitas off farm untuk meningkatkan penghasilan petani
	Meningkatkan ketahanan pangan	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan
Misi Kelima, Meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan	Meningkatkan layanan pemerintah desa kepada masyarakat	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan BPD Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perdesaan Menurunnya jumlah desa tertinggal
	Mewujudkan kemandirian masyarakat desa	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa Penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan

Sumber : RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019

Pada Tahun 2019, Kabupaten Ciamis masih dihadapkan pada masalah dan tantangan yang memerlukan adanya arah kebijakan yang ditetapkan dengan mengacu pada permasalahan menonjol sebagai isu strategis, baik Nasional, Provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Ciamis. Arah kebijakan ini merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program-program kepala daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi yang ditetapkan. Arah kebijakan ini juga memperhatikan isu global yang berkembang yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan global yang dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) dengan 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan
2. Tanpa Kelaparan
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan
4. Pendidikan Berkualitas
5. Kesetaraan Gender
6. Air Bersih dan Sanitasi
7. Energi Bersih dan Terjangkau
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10. Mengurangi Kesenjangan
11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab
13. Aksi Terhadap Iklim
14. Kehidupan Bawah Laut
15. Kehidupan di Darat
16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN

Prioritas pembangunan Tahun 2019 disusun berdasarkan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan dan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2018 serta perumusan permasalahan dan tantangan pada Tahun 2019. Selain itu, dalam penetapan prioritas ini juga memperhatikan tantangan dan isu pembangunan nasional Tahun 2019 serta isu strategis Provinsi Jawa Barat serta isu strategis Kabupaten Ciamis.

a. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional Tahun 2015-2019. Visi tersebut adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**, yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut **“Nawa Cita”**, yaitu:

- A. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- B. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- C. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- D. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

- E. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
- F. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
- G. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- H. Melakukan revolusi karakter bangsa;
- I. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam prioritas nasional dan program prioritas Tahun 2019, yaitu :

Prioritas Pembangunan Nasional di tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional adalah *Holistik, Tematik, Integratif*, dan *Spasial* melalui penguatan kebijakan *Money Follow Program*.

Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2019, adalah :

1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar; dengan arah kebijakan :
 - a. Mempercepat pengurangan kemiskinan;
 - b. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat;
 - c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak;
 - e. Meningkatkan tata kelola layanan dasar.
2. Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritim, dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan konektivitas;
 - b. Mengembangkan telekomunikasi dan informatika;
 - c. Mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di wilayah timur dan pembangunan desa;
 - d. Melaksanakan pembangunan daerah afirmasi;
 - e. Melaksanakan pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan sektor unggulan hulu – hilir perikanan
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif, dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktivitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana;
 - b. Mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai pasok/nilai, dan pemanfaatan inovasi;
 - c. Meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi, dan penguatan kemitraan;

- d. Mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerjasama dunia usaha dan kewirausahaan;
 - e. Mengembangkan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas antara lain melalui peningkatan SDM iptek, pengembangan litbang keilmuan strategis, dan pengembangan teknologi frontier.
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air, dengan arah kebijakan :
- a. Meningkatkan produksi energi primer;
 - b. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi
 - c. Meningkatkan aksesibilitas energi;
 - d. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik;
 - e. Mempertahankan dan memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri;
 - f. Meningkatkan layanan pertanian antara lain melalui penyediaan sarpras, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan;
 - g. Memperkuat distribusi dan stabilisasi harga pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat;
 - h. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat terutama untuk menurunkan kasus malnutrisi;
 - i. Memantapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air;
 - j. Meningkatkan perlindungan sumber air dan ekosistemnya;
 - k. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air yang adil dan merata;
 - l. Mempercepat regulasi dan pembangunan wilayah berbasis DAS;
 - m. Meningkatkan kesadaran terkait sumber daya air.
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu, dengan arah kebijakan :
- a. Meningkatkan Kamtibmas dan keamanan siber;
 - b. Memperkuat pertahanan wilayah nasional;
 - c. Meningkatkan kepastian hukum dan Reformasi Birokrasi;
 - d. Memperkuat efektivitas diplomasi

Perencanaan pembangunan nasional Tahun 2019 merupakan tahun kelima dari RPJMN Tahun 2015-2019 dengan tema pembangunan Tahun 2019, yaitu:

” Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas”.

Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dilakukan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial secara luas dan sasaran wilayah dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan.

Perencanaan pembangunan nasional Tahun 2019 dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di Tahun 2019, antara lain meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% – 5,6%;
2. Laju inflasi sebesar 2,5% – 4,5%;
3. Angka kemiskinan sebesar 8,5% - 9,5%;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,8% – 5,2%

b. Arah Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2019

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menindaklanjuti kebijakan umum dan operasional pembangunan, mengarahkan prioritas pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Akses dan kualitas pendidikan Rintisan wajib belajar 12 tahun, pelayanan kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar lainnya, dengan sasaran :
 - a. Meningkatkan akses terhadap pendidikan khusus dan layanan khusus, pendidikan menengah dan pendidikan dasar;
 - b. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah;
 - c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
 - d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan budaya hidup sehat;
 - e. Meningkatkan upaya Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
 - f. Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak serta gizi masyarakat;
 - g. Meningkatkan cakupan layanan air minum;
 - h. Meningkatkan cakupan layanan sanitasi;
 - i. Meningkatkan akses rumah layak huni;
 - j. Terwujudnya Kawasan permukiman yang memenuhi lingkungan yang sehat, aman dan berkelanjutan didukung PSU.
2. Peningkatan interkoneksi pusat - pusat pertumbuhan dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi, dengan sasaran:
 - a. Meningkatkan pembangunan sarpras utama di PKN, PKW, dan PKL;
 - b. Meningkatkan kinerja layanan infrastruktur transportasi (jalan dan perhubungan);
 - c. Meningkatkan kinerja sistem jaringan irigasi;
 - d. Meningkatkan ketersediaan dan pelayanan air baku;
 - e. Meningkatkan pembinaan pengembangan energi baru terbarukan.
3. Mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan sektor potensial, dengan sasaran :
 - a. Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi;
 - b. Meningkatkan kemitraan strategis antara usaha besar dengan Koperasi dan Usaha Kecil (KUK);
 - c. Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata;
 - d. Meningkatkan kapasitas ekonomi kreatif;

- e. Meningkatnya akses terhadap modal, pemasaran dan fungsi intermediasi perbankan.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai melalui konservasi sumber daya alam dan peningkatan tutupan vegetasi;
 - b. Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara;
 - c. Meningkatnya pengendalian dampak perubahan iklim melalui upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - d. Meningkatnya mitigasi, ketangguhan, serta kinerja penanggulangan bencana alam;
 - e. Meningkatnya kinerja pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang
 5. Pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan agroindustri berkelanjutan, dengan sasaran:
 - a. Tersedianya cadangan pangan yang memadai dan pemenuhan protein hewani;
 - b. Meningkatnya produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, melalui pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautan dan perikanan.
 6. Penguatan Reformasi Birokrasi, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
 - b. Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien;
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
 7. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya perlindungan sosial dan pemberdayaan bagi rumah tangga miskin dan PMKS;
 - b. Meningkatnya kompetensi dan penyaluran tenaga kerja;
 - c. Pengembangan kewirausahaan;
 - d. Penguatan kelembagaan dan pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT);
 - e. Meningkatnya sarana penyediaan tenaga listrik di daerah terpencil dan perdesaan bagi penduduk miskin.
 8. Peningkatan modal sosial masyarakat untuk daya saing Jawa Barat, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan;
 - b. Meningkatnya toleransi beragama;
 - c. Meningkatnya budaya gotong royong dalam pembangunan.

Sedangkan isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 yaitu:

1. Pengurangan Kemiskinan dan pengangguran;
2. Penurunan Ketimpangan melalui optimalisasi konektivitas dan sektor unggulan di wilayah pengembangan dan Kawasan Strategis Provinsi;
3. Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang;
5. Penguatan Reformasi Birokrasi;

6. Optimalisasi Modal Sosial dalam pembangunan daerah.

Tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 adalah:

**“Peningkatan daya saing daerah Bagi Upaya Mencapai Kemandirian Masyarakat
Jawa Barat”**

c. Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2019

Sejalan dengan kondisi di tingkat nasional dan kondisi Jawa Barat serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2019, maka isu strategis Kabupaten Ciamis Tahun 2019 adalah :

1. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan
2. Aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat
3. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah dan pelaku usaha
4. Peningkatan Ketahanan Pangan
5. Optimalisasi layanan kemiskinan
6. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
7. Peningkatan pengelolaan pariwisata, seni , budaya, pemuda dan olahraga
8. Peningkatan mitigasi bencana alam
9. Optimalisasi kinerja Pemerintahan Daerah dan Desa
10. Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019

Selain itu, terdapat pula Janji Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 yang pada Tahun 2019 juga akan menjadi fokus kegiatan Janji Bupati dan Wakil Bupati tersebut adalah:

1. Membangun Unit Pelayanan Penanggulangan Kemiskinan.
2. Anggaran sebesar Rp 20 miliar bantuan pelayanan kesehatan gratis untuk berobat ke puskesmas/Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) bagi masyarakat tidak mampu.
3. Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Ciamis.
4. Anggaran sebesar Rp 12 miliar untuk pengembangan 10 Puskesmas rawat inap.
5. Revitalisasi pembangunan sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan
6. Anggaran sebesar Rp 9 miliar bantuan pendidikan ke SLTA (penuntasan wajib belajar 12 tahun).
7. Anggaran sebesar Rp 1 miliar penanggulangan siswa drop out.
8. Anggaran sebesar Rp 15 miliar bantuan pemberdayaan usaha bagi warga tak mampu.
9. Anggaran sebesar Rp 5 miliar bantuan rehab rumah tak layak huni.
10. Anggaran sebesar Rp 50 miliar untuk pengaspalan (hot mix).
11. Anggaran sebesar Rp 15 miliar pembangunan dan rehabilitasi irigasi.
12. Anggaran sebesar Rp 28 miliar untuk bantuan aspal dan semen untuk perbaikan jalan desa.

13. Perbaikan kesejahteraan kepala desa, perangkat desa, kepala dusun, Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT).
14. Penanggulangan pengangguran melalui pelatihan usaha, kerja dan peningkatan keterampilan.
15. Bantuan Pemasangan Listrik Baru Bagi keluarga Tidak mampu.
16. Anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk Peningkatan Pendidikan Keagamaan. Bantuan kesejahteraan/insentif guru madrasah, RA, TKA, TPA dan DKM, Bantuan pesantren dan madrasah.
17. Revitalisasi Posyandu Rp 1 Miliar.
18. Reformasi Birokrasi, Peningkatan kualitas Pelayanan publik.
19. Penyelesaian masalah pertanahan.
20. Pengembangan dan pengendalian lingkungan hidup.
21. Penataan Ibu Kota Kabupaten dan Kota Kecamatan.
22. Pengembangan wisata, kesenian dan olah raga, termasuk membangun gedung kesenian.

Untuk Tema Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2019 adalah :

“Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Menuju kemandirian Tahun 2019”

Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2019 disusun melalui penyelarasan dengan prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 dan memperhatikan isu strategis Kabupaten Ciamis Tahun 2019. Prioritas pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2019 adalah:

1. Peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas
 - b. Meningkatnya budaya dan minat baca
2. Peningkatan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Meningkatnya layanan kesehatan
 - b. Meningkatnya kesehatan lingkungan
3. Pengembangan pertanian dan Perikanan, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Terjaminnya lahan pertanian berkelanjutan
 - b. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi pertanian , peternakan dan perikanan
 - c. Berkembangnya berbagai aktivitas off farm untuk meningkatkan penghasilan petani

- d. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan
 - e. Peningkatan dan pemerataan akses sarana dan prasarana pertanian, kehutanan dan perikanan
 - f. Peningkatan kapasitas petani dan penyuluh
4. Pengembangan pariwisata dan dunia usaha, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
- a. Pengembangan kepariwisataan
 - b. Pelestarian budaya daerah, peninggalan sejarah dan kepurbakalaan
 - c. Pengembangan industri kecil dan menengah
 - d. Peningkatan kapasitas pelaku usaha
 - e. Pengembangan sentra industri
 - f. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
 - g. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
 - h. Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan
 - i. Perbaikan iklim usaha investasi
5. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan ketenagakerjaan, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
- a. Menurunnya tingkat kemiskinan.
 - b. Menurunnya PMKS
6. Pemberdayaan masyarakat pengarusutamaan gender serta pemuda dan olahraga, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
- a. Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk
 - b. Meningkatnya partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan
 - c. Meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan
 - d. Meningkatnya prestasi olahraga.
 - e. Pengembangan sarana dan prasarana olah raga, pembinaan atlet, serta kepemudaan.
7. Penanggulangan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
- a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang
 - b. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana
8. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
- a. Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan kabupaten
 - b. Peningkatan kualitas pengelolaan dan penyediaan sumber daya air
 - c. Penataan lingkungan perkotaan

- d. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat
9. Meningkatkan Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
- a. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur
 - b. Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan
 - c. Pentaa Sistem Hukum dan Penegakan hukum
 - d. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
 - e. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah
 - f. Penataan Sistem Informasi pembangunan Daerah
 - g. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi
 - h. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan
 - i. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan
 - j. Fasilitasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden
10. Pembangunan Perdesaan, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
- a. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan BPD
 - b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa.
 - c. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pem-bangunan desa.
 - d. Penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.

Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Ciamis selama ini masih perlu difokuskan untuk mengatasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah, dalam hal ini kesenjangan antar wilayah baik antar kabupaten/kota maupun antar wilayah perkotaan dan perdesaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 telah disusun suatu kebijakan pembangunan kewilayahan dalam rangka menciptakan rentang kendali yang proporsional dan mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan setiap wilayah melalui Sistem Pusat Kegiatan yaitu Sistem Perkotaan (Pusat Kegiatan Lokal-PKL) dan Pusat Pelayanan Kecamatan-PPK) dan Sistem Perdesaan, yaitu terdiri dari:

1. Sistem perkotaan meliputi:
 - a. PKL Ciamis sebagai pusat pelayanan skala kabupaten;
 - b. PKL Banjarsari sebagai pusat pelayanan wilayah tengah kabupaten;
 - c. PKL Kawali sebagai pusat pelayanan wilayah Utara Kabupaten;
 - d. PKL Cijeungjing sebagai pusat pelayanan wilayah Timur koridor Jalan Arteri Primer;
 - e. PKL Sindangkasih-Cikoneng sebagai pusat pelayanan wilayah Barat koridor Jalan Arteri Primer;
 - f. PKL Rancah sebagai pusat pelayanan wilayah Utara Timur;
 - g. PKL Panjalu sebagai pusat pelayanan wilayah Utara Barat;
 - h. PKL Pamarican sebagai pusat pelayanan wilayah tengah Barat;

- i. PPK sebagai pusat pelayanan kecamatan meliputi Kecamatan Sadananya, Kecamatan Baregbeg, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Cisaga, Kecamatan Cihaurbeuti, Kecamatan Jatinagara, Kecamatan Rajadesa, Kecamatan Panawangan, Kecamatan Cipaku, Kecamatan Lumbung, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Sukamantri, Kecamatan Lakkok, Kecamatan Cimaragas, Kecamatan Cidolog, dan Kecamatan Purwadadi.
2. Sistem perdesaan, berupa PPL meliputi:
 - a. Desa Karangpaningal berada di Kecamatan Panawangan;
 - b. Desa Tigaherang berada di Kecamatan Rajadesa;
 - c. Desa Buanamekar di Kecamatan Panumbangan;
 - d. Desa Patakarja berada di Kecamatan Rancah;
 - e. Desa Sukasari berada di Kecamatan Tambaksari;
 - f. Desa Pusakanagara berada di Kecamatan Baregbeg;
 - g. Desa Sidamulya, Sukahurip, dan Bangunharja berada di Kecamatan Cisaga;
 - h. Desa Pasirnegara dan Kertahayu berada di Kecamatan Pamarican;
 - i. Desa Cintajaya, Tambakreja, dan Desa Sidaharja berada di Kecamatan Lakkok;
 - j. Desa Padaringan dan Sidarahayu berada di Kecamatan Purwadadi;
 - k. Desa Ciulu, Kalijaya, dan Cigayam berada di Kecamatan Banjarsari (dan Kecamatan Banjaranyar saat ini).

Sedangkan rencana pembangunan kawasan yang mempunyai pengaruh sangat penting secara regional dan bagi Kabupaten Ciamis dalam aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi telah ditetapkan melalui Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Jawa Barat dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kabupaten Ciamis, yaitu terdiri dari :

1. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah.
2. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kabupaten Ciamis, yaitu:
 - 1) KSK Koridor Jalan Arteri Primer Cihaurbeuti-Cisaga, dengan kriteria kawasan yang memiliki kemampuan cepat tumbuh yang tinggi, kawasan yang berpotensi tumbuhnya berbagai kegiatan tanpa terkendalinya secara linear sepanjang koridor jalan arteri primer sebagai dampak kestrategisan jaringan jalan arteri primer, kawasan yang diprioritaskan menjadi kawasan yang diprioritaskan menjadi kawasan yang dapat mendorong perekonomian Kabupaten Ciamis. Isu penanganan yang harus dilakukan adalah mengakomodir kegiatan yang sesuai di sepanjang koridor, penataan pusat pemerintahan kabupaten dan kegiatan potensial lainnya di sepanjang koridor secara terintegrasi. Ruang lingkup wilayah meliputi Perkotaan Cihaurbeuti, Perkotaan Sindangkasih, Perkotaan Cikoneng, Perkotaan Ciamis, Perkotaan Cijeungjing dan Perkotaan Cisaga.
 - 2) KSK Situ Panjalu, dengan kriteria kawasan wisata unggulan yang memiliki potensi mendorong pertumbuhan perekonomian khususnya di bagian Utara

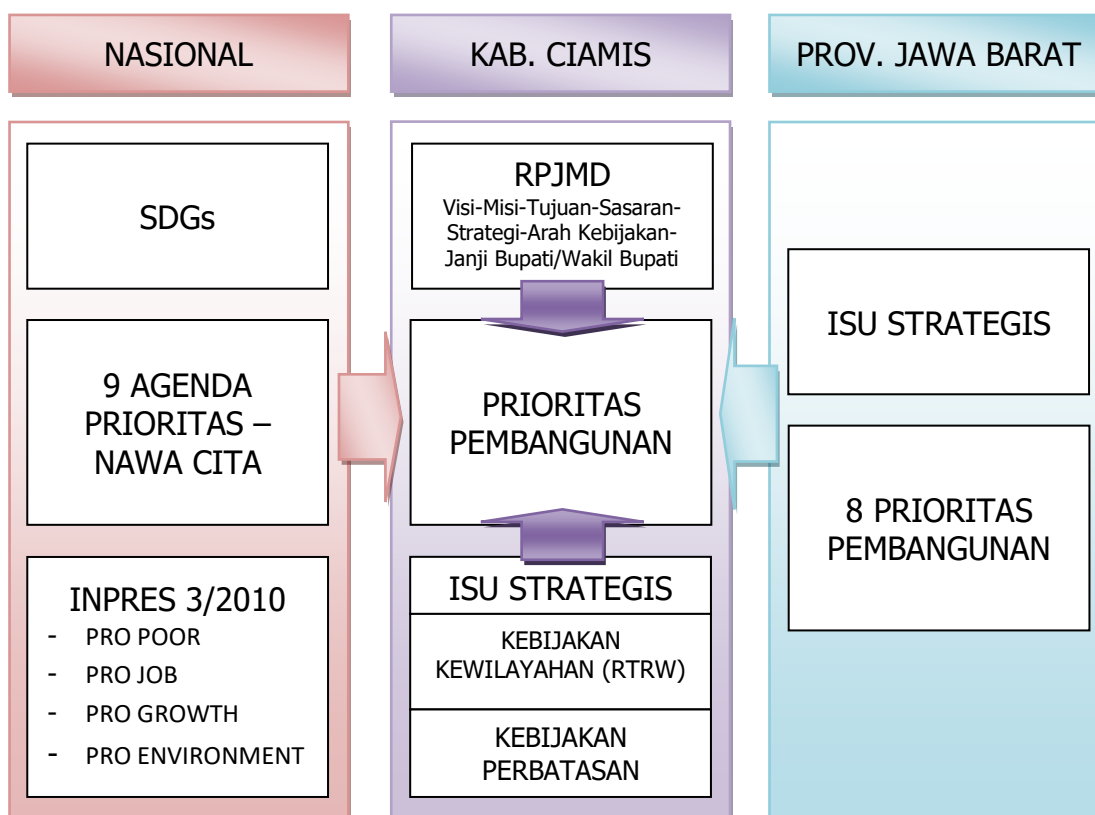
Kabupaten Ciamis. Isu penanganan untuk pelestarian, pengendalian dan pemanfaatan kawasan lindung sebagai obyek wisata yang handal. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Panjalu, Kecamatan Sukamantri.

- 3) KSK Agropolitan di Kecamatan Sukamantri, Panumbangan, Panjalu dan Cihaurbeuti, dengan kriteria kawasan yang memiliki potensi sebagai kawasan cepat tumbuh dan berkembang di sektor pertanian. Isu penanganan untuk penyediaan sarana dan prasarana kawasan agropolitan dan mewujudkan program-program kawasan agropolitan. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Panumbangan, Sukamantri, Panjalu, Cihaurbeuti dan Lumbung.
- 4) KSK Kawasan Perkotaan Kawali, dengan kriteria kawasan perkotaan yang dipersiapkan menjadi pusat kegiatan dan pertumbuhan di koridor kawasan paling utara Kabupaten Ciamis. Isu penanganan untuk pengembangan sarana dan prasarana perkotaan yang mampu memberikan pelayanan kegiatan secara optimal bagi kawasan utara Kabupaten Ciamis, dan pengembangan sarana prasarana ekonomi sesuai skala pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat paling Utara Kabupaten Ciamis.
- 5) KSK Kawasan Perkotaan Banjarsari, dengan kriteria kawasan perkotaan yang dipersiapkan untuk memiliki kemampuan sebagai penyangga pergerakan ke arah Kota Banjar. Isu penanganan berupa pengembangan sarana prasarana perkotaan yang mampu menyangga pergerakan eksternal.
- 6) KSK Lumbung Padi, dengan kriteria kawasan yang memiliki potensi pertanian lahan basah (sawah) sebagai lumbung padi Kabupaten Ciamis. Isu penanganan berupa peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, mengendalikan alih fungsi lahan sawah, pengembangan perekonomian masyarakat dan penanganan kendala dan permasalahan penghambat pengembangan pertanian sawah. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Banjarsari, Lakbok, dan Purwadadi.
- 7) KSK Perbatasan Kabupaten Koridor Utara, dengan kriteria kawasan yang perlu didorong perekonomian masyarakat perbatasan dan kawasan yang membutuhkan penanganan bersama dengan kabupaten/kota perbatasan untuk mewujudkan struktur dan pola ruang kawasan perbatasan. Isu penanganan berupa pengembangan kegiatan dan infrastruktur yang mendukung perkembangan kawasan perbatasan dan terintegrasi dengan kabupaten/kota sekitar, dan koordinasi penanganan bersama dengan kabupaten/kota sekitar untuk mewujudkan struktur dan pola ruang perbatasan di masing-masing kabupaten/kota.
- 8) KSK Perbatasan Kabupaten Koridor Barat, dengan kriteria kawasan yang perlu didorong perekonomian masyarakat perbatasan dan kawasan yang membutuhkan penanganan bersama dengan kabupaten/kota perbatasan untuk mewujudkan struktur dan pola ruang kawasan perbatasan. Isu penanganan berupa pengembangan kegiatan dan infrastruktur

yang mendukung perkembangan kawasan perbatasan dan terintegrasi dengan kabupaten/kota sekitar, dan koordinasi penanganan bersama dengan kabupaten/kota sekitar untuk mewujudkan struktur dan pola ruang perbatasan di masing-masing kabupaten/kota.

Gambar 4.1.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional



Hasil yang ingin dicapai pada tahun 2019 dapat terlihat dari target Indikator Makro Pembangunan seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2

Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2019

No.	Indikator	Target Awal	Target Penyesuaian
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,18 (metode lama)	69,36 (metode baru)
a.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,52 (metode lama)	7,73 (metode baru)
b.	Angka Melek Huruf (AMH)	99,37	-
c.	Angka Harapan Lama Sekolah	%	14,66
d.	Angka Harapan Hidup (AHH)	68,22 (metode lama)	70,55 (metode baru)
e.	Daya Beli Masyarakat	642.640,- (metode lama)	Rp. 8.326.400 (metode baru)
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,05	-
3	Persentase Penduduk Miskin	6,97	7,35
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,32	5,21

Sumber: RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019

4.3. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan dan target indikator makro Kabupaten Ciamis Tahun 2019 dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 adalah berjumlah program yang terbagi ke dalam 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 8 Urusan Pilihan, 5 Urusan Penunjang Pemerintahan, 4 Urusan Pendukung, Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kewilayahan dan Non Urusan, yaitu:

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

(1) Pendidikan

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI);
3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
5. Program Pendidikan Non Formal dan Informal;
6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

(2) Kesehatan

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
2. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
3. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
4. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit ;
5. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
6. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD;
7. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
9. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
10. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
12. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
13. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
14. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan makanan.

(3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
3. Program Pembangunan turap/talud/bronjong;
4. Program Pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan;
5. Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;

6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
 7. Program Pengendalian Banjir;
 8. Program Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Perkotaan;
 9. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong;
 10. Program Perencanaan Tata Ruang;
 11. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 12. Program Pemanfaatan Ruang;
 13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan.
- (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
 2. Program Pengembangan Perumahan;
 3. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
 4. Program Pengelolaan Areal Pemakaman;
 5. Program Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Perkotaan.
- (5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
 2. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
 3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
 4. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;
 5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
- (6) Sosial
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya;
 2. Program Layanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
 3. Program Pembinaan Anak Terlantar;
 4. Program Pembinaan Panti Asuhan atau Panti Jompo;
 5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

- (1) Tenaga Kerja
1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
 2. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja;
 3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 4. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
 2. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
 3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

- (3) Pangan
 - 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
 - 2. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat.
- (4) Pertanahan
 - 1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
 - 2. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan.
- (5) Lingkungan Hidup
 - 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
 - 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - 3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam;
 - 4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 5. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH);
 - 6. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.
- (6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 1. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
- (7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 1. Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - 2. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
 - 3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
 - 4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
 - 5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
- (8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 1. Program Keluarga Berencana;
 - 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
 - 3. Program Pengembangan Pusat Pelayanan informasi dan Konseling.
- (9) Perhubungan
 - 1. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
 - 2. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
 - 3. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
 - 4. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
- (10) Komunikasi dan Informatika
 - 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
 - 2. Program Kerjasama Informasi dan Mass Media.
- (11) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - 1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
- (12) Penanaman Modal
 - 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
 3. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah.
- (13) Kepemudaan dan Olahraga
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
 2. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga;
 3. Program Pembinaan Kepemudaan;
 4. Program Kepemudaan dan Olahraga;
 5. Program peningkatan peran serta kepemudaan.
- (14) Statistik
1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik daerah.
- (15) Persandian
1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
- (16) Kebudayaan
1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
 2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
 3. Program Pengembangan Kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.
- (17) Perpustakaan
1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
- (18) Kearsipan
1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi;
 2. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;
 3. Program Pembinaan Arsip Statis.

C. Urusan Pilihan

- (1) Kelautan dan Perikanan
1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
 2. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
- (2) Pariwisata
1. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
 2. Program Pengembangan Kemitraan;
 3. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 4. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
- (3) Pertanian
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
 2. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan;
 3. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
 4. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan;
 5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan;
 6. Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan;
 7. Program peningkatan produksi, produktivitas hortikultura ramah lingkungan;

8. Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan;
 9. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan;
 10. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian;
 11. Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan;
 12. Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian;
 13. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Hewan/ternak;
 14. Program peningkatan produksi hasil peternakan;
 15. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan;
 16. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan;
 17. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan dan Perikanan.
- (4) Kehutanan
 - (5) Energi dan Sumber Daya Mineral
 - (6) Perdagangan
 1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
 2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
 - (7) Perindustrian
 1. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
 2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
 - (8) Transmigrasi
 1. Program Pengembangan Kapasitas Calon Transmigran;
 2. Program Transmigrasi Regional.

D. Urusan Penunjang Pemerintahan

- (1) Inspektorat
 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;
 2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
 3. Program Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
- (2) Perencanaan
 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
 3. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya;
 4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.
- (3) Keuangan
 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Kepegawaian
 1. Program Fasilitasi pindah/Purna tugas PNS;
 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;

- (5) Pendidikan dan Pelatihan
 - 1. Program Pendidikan Kedinasan;
 - 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
- (6) Penelitian dan Pengembangan
 - 1. Program Pengembangan data/informasi.

E. Pendukung

- (1) Sekretariat Daerah
 - 1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /WKDH;
 - 2. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota;
 - 3. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
 - 4. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah;
 - 5. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
 - 6. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah;
 - 7. Program Fasilitasi dan Pengembangan Kebijakan Perekonomian;
 - 8. Program Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan;
 - 9. Program Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Daerah;
 - 10. Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Desa;
 - 11. Program Pelayanan Fasilitasi KDH/WKDH;
 - 12. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan;
 - 13. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
- (2) Sekretariat DPRD
 - 1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

F. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

- 1. Program Pendidikan Politik Masyarakat;
- 2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
- 4. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

G. Kewilayahan

- 1. Program Penataan Daerah Otonom.

H. Non Urusan

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- 3. Program peningkatan disiplin aparatur;
- 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Selanjutnya prioritas pembangunan daerah dijelaskan ke dalam program dengan target indikator kinerja pembangunan daerah Tahun 2019 sebagaimana tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3
Penjelasan Program Pembangunan

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
Peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan	Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Partisipasi anak usia dini dalam PAUD	53	%
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru berkualifikasi S1 di tingkan pendidikan dasar dan menengah	0	guru
			kompetensi sumberdaya manusia (pendidik)	5,4	guru
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	pemetaan tenaga pendidik dan kependidikan	100	%
			Jumlah guru yang bersertifikasi	14.416	guru
			Meningkatnya kapasitas komite sekolah	200	sekolah
			Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan yang efisien dan efektif	820	sekolah
			kerjasama kelembagaan bidang pendidikan	7	lembaga
		Program Pendidikan Non Formal dan Informal	Fasilitasi penyelenggaraan paket A, B dan C	40	lembaga
			Akreditasi lembaga kursus dan keterampilan	10	lembaga
			Fasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan Non formal	60	lembaga

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja					
			Indikator	Target	Satuan			
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI	105.41	%			
			Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs	98.62	%			
			Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI	99.02	%			
			Angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	97.07	%			
			Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana	45	%			
			kelulusan UN siswa kelas 6 SD/MI	100	%			
			kelulusan UN siswa kelas 3 SMP/Mts	100	%			
			Jumlah bantuan Siswa yang berkebutuhan khusus	20	siswa			
			Program Pendidikan Menengah	Program Pendidikan Menengah	Angka partisipasi kasar (APK) SMA/MA/SMK	73.67	%	
					Angka partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	64.09	%	
					Penyediaan sarana dan prasarana	13	%	
					kelulusan UN siswa kelas 3 SMA/SMK- /MA	100	%	
				Meningkatnya budaya dan minat baca	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Meningkatnya koleksi bahan pustaka	41.339	Eksemplar

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
			Meningkatnya pengunjung perpustakaan	29.165	orang
Peningkatan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan	Meningkatnya layanan kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengadaan obat untuk 37 PKM	100	%
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	rasio puskesmas/Pustu/Pokesdes	0.039	%
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Terstandarisasinya pelayanan kesehatan di puskesmas	14	puskesmas
			kepuasan pengunjung puskesmas	90	%
			Terstandarisasinya pelayanan kesehatan di rumah sakit	16	jenis pelayanan
		Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Meningkatnya sediaan layanan kesehatan, sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit	100	%

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumahsakit	100	%
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	jumlah kunjungan pasien umum dan BPJS	120.000	Kunjungan
		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kemitraan pelayanan kesehatan spesialistik	30	dokter spesialis
			Jumlah kunjungan BPJS	247.066	Kunjungan
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan desa /kelurahan siaga aktif (SPM)	70	%
			Penyuluhan masyarakat Pola hidup sehat	75	%
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kunjungan ibu hamil keempat kali telah mendapat pelayanan sesuai standar kebidanan (K4) (SPM)	93	%
			Persalinan oleh tenaga kesehatan (SPM)	93	%
			Kunjungan neonatus (bayi baru lahir umur 0 - 28 hari)	95	kunjungan
			Kunjungan bayi (umur 29 hari - 11 bulan) (SPM)	95	kunjungan

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
			Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) Kab/Kota	100	%
			Cakupan peserta aktif KB (SPM)	80	%
			Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru UKS/ dokter kecil (SPM)	100	%
			Puskesmas menjalankan deteksi dini pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular	37	Puskesmas
			Persentase desa/Kelurahan yang melaksanakan sanitasi Total Berbasis masyarakat	55	%
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	281.138	orang
			Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin	2.093	orang
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Prevalensi kasus HIV	<0,5	per 1000 pddk
			desa/Kelurahan UCI (SPM)	100	%

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja			
			Indikator	Target	Satuan	
			desa/Kelurahan yang mengalami KLB ditangani < 24 jam (SPM)	100	kejadian	
			Surveilans penyakit menular dan tidak menular	265	Desa/ kelurahan	
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Balita gizi buruk mendapat perawatan	100	balita	
	Meningkatnya kesehatan lingkungan	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Akses Jamban	67,4	%	
			Akses Air Bersih	81	%	
			Jumlah desa/Kelurahan yang melaksanakan sanitasi Total Berbasis masyarakat	55	desa/ kelurahan	
		Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	jumlah fasilitas industri rumah tangga yang terdaftar	77,5	IRT	
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	cakupan promosi pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat terhadap PHBS paska perawatan di rumah sakit	100	%	
	Pengembangan pertanian dan perikanan	Terjaminnya lahan pertanian berkelanjutan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	luas lahan sawah baru	50	Ha
				Ketersediaan energi dan protein per kapita	100	%
Penguatan cadangan pangan				85	%	

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
			Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	90	%
			Stabilisasi harga dan pasokan	90	%
			Pencapaian skor pola pangan harapan	90	%
			Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80	%
			Penanganan daerah rawan pangan	80	%
			Terselenggaranya pameran HKP, HPS dan Rapat koordinasi DKP Tk Kab, Prov, Nas	9	Kegiatan
	Meningkatkannya produksi dan produktivitas komoditi pertanian , peternakan, perikanan dan kehutanan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian/perkebunan	jumlah prasarana yang diperbaiki (JITUT/JIDES)	3.000	Ha
panjang jalan usaha tani dalam kondisi baik			22,20	km	
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan		Terealisasinya penerimaan dana bagi hasil provisi sumber daya hutan	1,1 Milyar	Rupiah/tahun	

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
		Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	jumlah produksi komoditi pertanian		
			- Padi	455.135	ton
			- Jagung	22.672	ton
		Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hortikultura	produktivitas komoditi hortikultura	592.757	ton
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Ikan	jumlah kejadian penyakit pada ternak	0	kasus
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna	Jumlah ternak yang di IB	1.245	ekor
		Program PSDS dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang aman, sehat, utuh dan halal	jumlah produksi daging sapi	1.170,15	ton
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah Kejadian penyakit hewan	0	Kasus
		Berkembangnya berbagai aktivitas off farm untuk meningkatkan penghasilan petani	Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	Kehilangan hasil panen (losses)	9,6

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
			Jumlah Kemitraan	5	unit
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	jumlah promosi hasil pertanian/perkebunan	5	kali	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	jumlah petani yang terlatih kegiatan	26	Kelompok	
	Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah kegiatan promosi peternakan	4	kali	
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Peternakan dan perikanan	Jumlah kegiatan promosi peternakan	4	kali	
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi ikan	97,71	ton	
	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Jumlah Penyuluh Pertanian, Perikanan dan kehutanan	175	orang	
		Meningkatnya kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang mandiri	172	Kelompok	
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	jumlah promosi hasil pertanian/perkebunan	5	kali	
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah kegiatan promosi peternakan	4	kali	
	Meningkatnya ketersediaan, keterjang-	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	luas lahan sawah baru	50	Ha

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
	kauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan		Ketersediaan energi dan protein per kapita	100	%
			Penguatan cadangan pangan	85	%
			Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	90	%
			Stabilisasi harga dan pasokan	90	%
			Pencapaian skor pola pangan harapan	90	%
			Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80	%
			Penanganan daerah rawan pangan	80	%
			Terselenggaranya pameran HKP, HPS dan Rapat koordinasi DKP Tk Kab, Prov, Nas	9	Kegiatan
			Peningkatan dan pemerataan akses sarana dan prasarana pertanian, kehutanan dan perikanan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan	jumlah prasarana yang diperbaiki (JITUT/JIDES)
	Peningkatan kapasitas petani dan penyuluh	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Jumlah Penyuluh Pertanian, Perikanan dan kehutanan	175	orang

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
			Meningkatnya kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang mandiri	172	Kelompok
Pengembangan pariwisata dan dunia usaha	Pengembangan kepariwisataan	Program pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya	Jumlah pelaku sektor ekonomi kreatif yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan produksi karya kreatif sektor EKSB	100	orang
		Program pengembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK			
		Program Pengembangan Kemitraan	jumlah kerjasama perencanaan pembangunan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	2	dokumen
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan	6	Wilayah
	Jumlah hotel		13	unit	
	Pelestarian budaya daerah, peninggalan sejarah dan kepurbakalaan	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	jumlah kunjungan wisata	650	orang
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	jumlah grup kesenian	503
		Program Pengembangan Kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah.	104	penghargaan

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
			Terselenggaranya gelar karya dan kreatifitas seni budaya daerah	22	event
			Jumlah situs	337	situs
	Pengembangan industri kecil dan menengah	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah sentra industri	33	jenis komoditi
		Program peningkatan kemampuan teknologi industri	jumlah IKM yang memiliki hak paten	14	IKM
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM	9.442	Unit
			jumlah klaster industri	2	klaster
	Peningkatan kapasitas pelaku usaha	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Pameran produk unggulan	6	kali
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Terbangunnya sistem informasi investasi	1	sistem
			Lama proses Perijinan	10	hari
		program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah	dokumen potensi daerah	1	dokumen
	Pengembangan sentra industri	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah sentra industri	33	jenis komoditi
		Program peningkatan kemampuan teknologi industri	jumlah IKM yang memiliki hak paten	14	IKM
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM	9.442	Unit
			jumlah klaster industri	2	klaster

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM	Jumlah usaha skala mikro	2.865	unit
			jumlah usaha skala kecil	1389	unit
			Jumlah usaha skala menengah	29	unit
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah koperasi yang mendapat dukungan permodalan	48	koperasi
			Jumlah kelompok yang mendapat permodalan	277	kelompok
		Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif	369
	Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Inspeksi Produk	5	kali
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tersedianya pasar pemda yang layak	3	pasar
Tersedianya pasar desa yang layak			17	pasar	
Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan		jumlah sarana prasarana PKL dan asongan	23	lokasi	
Perbaiki iklim usaha investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Pameran produk unggulan	6	kali	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Terbangunnya sistem informasi investasi	1	sistem	
Lama proses Perijinan		10	hari		

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
		program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah	dokumen potensi daerah	1	dokumen
Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan	Menurunnya tingkat kemiskinan.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Persentase PMKS, KAT dan fakir miskin skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial	1.900	Orang
		Program Pengembangan kapasitas calon transmigran	Jumlah calon transmigran yang dibina	1.400	KK
		Program Transmigrasi Regional	Jumlah transmigran Regional	100	KK
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat pengangguran terbuka	4,5	%
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	94,92	%
			jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	70	orang
		Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	jumlah pencari kerja	94,92	orang
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	jumlah pencari kerja terlatih	122	orang
			Pengembangan KLK dan pembentukan BLK	2	Unit
		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Kepesertaan Pekerja/Buruh dalam Program Jamsostek	4.484	orang
	Menurunnya PMKS.	Program Layanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS	1.900	orang
			Peningkatan kualitas penanganan PMKS & PSKS	50	%
		Program Pembinaan Anak Terlantar	Peningkatan kualitas pembinaan anak jalanan	25	%
		Program Pembinaan Panti Asuhan atau Panti jompo	Meningkatnya manajemen panti sosial	105	panti
		Program Pemberdayaan	Jumlah kelembagaan kesejahteraan sosial	90	lembaga

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
		Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	yang dibina		
		program pencegahan dan penanggulangan korban bencana alam	jumlah masyarakat terlatih untuk penanggulangan bencana	210	orang
Pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender serta pemuda dan olahraga	Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk	Program Keluarga Berencana	Cakupan PUS peserta KB aktif	76,5	%
			cakupan penyediaan data mikro keluarga setiap tahunnya	100	%
			cakupan ketersediaan alat dan obat KB	100	%
			Cakupan BKB/BKR/BKL terbina	80	%
			Jumlah Jiwa Perkeluarga	3.115	Orang
			Jumlah UPPKS yang mendapat modal	292	Kelompok
			Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita	19.85
	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling	Jumlah PPKS tingkat kecamatan	2	kelompok	
	Meningkatnya partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan	Program Pembinaan Kepemudaan	Jumlah kegiatan kepemudaan	118	kali
			Pogram Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah Kewirausahaan pemuda	58
	Meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	15,17	%
			Partisipasi angkatan kerja perempuan	2,25	%
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan			100	%	

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja			
			Indikator	Target	Satuan	
				Rasio KDRT	0,002	%
				Desa Layak Anak	2	Desa
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	1	kelompok		
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	jumlah pembinaan politik	10	kali		
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda	4320	kasus		
		fasilitasi kominda	12	kegiatan		
		Jumlah Kasus Sara	0	Kasus		
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	pembentukan dan pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	40	kelompok		
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	cakupan patroli petugas satpol PP	1095	kali		
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	terfasilitasniya kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	6	kali		
	Meningkatnya prestasi olahraga.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah gedung olahraga	162	unit	
			Jumlah lapangan olahraga	1.021	unit	
		Program Pembinaan Olahraga	Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional dan internasional	16	orang	
			Jumlah klub olahraga	91	klub	
	Pengembangan sarana dan prasarana olah raga, pembinaan atlet, serta kepemudaan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah gedung olahraga	162	unit	
			Jumlah lapangan olahraga	1.021	unit	
		Program Pembinaan Olahraga	Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional dan internasional	16	orang	
			Jumlah klub olahraga	91	klub	

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja			
			Indikator	Target	Satuan	
Penanggulangan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup,	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Program perencanaan tata ruang	Jumlah rencana tata ruang	12	dokumen	
			Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya	50	Bh	
			Jumlah Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	2	dokumen	
		Program pengendalian pemanfaatan ruang	Pengendalian alih fungsi lahan	0,013	%	
		Program Pemanfaatan ruang	Kesesuaian Perizinan Terhadap Rencana Tata Ruang	100	%	
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah kampung iklim yang dikembangkan	14	kampung	
			Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persentase kasus lingkungan yang ditindaklanjuti	100	%
				Pelayanan pencegahan pencemaran air	100	%
				Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	100	%
				Jumlah bank sampah/Sarana pengelolaan sampah 3R	16	unit

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
		Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah sekolah yang berbudaya lingkungan/ berwawasan Adiwiyata	30	sekolah
			Jumlah Informasi kerusakan lahan untuk produksi biomassa	25	%
		Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase RTH yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah di Wilayah Perkotaan	1,44	%
		Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah	12,07	%
		Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Luasan taman hijau/koleksi tumbuhan local yang langka	0	ha
			Jumlah lubang resapan biopori	12	unit
	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Jumlah sumber mata air yang direhabilitasi	1	buah	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana	program pencegahan dan penanggulangan korban bencana alam	jumlah masyarakat terlatih untuk penanggulangan bencana	210	orang
		Program Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	12,33	%

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
			Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK (wilayah manajemen kebakaran)	96,6	%
			Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi (orang)	18	orang
			Persentase cakupan WMK yang memiliki mobil dan/atau mesin damkar layak pakai	26,92	%
Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan kabupaten	Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	334,91	km
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			
		Program pembangunan turap/talud/bronjong			
		Program pembangunan sistem informasi /Database jalan dan jembatan			
		Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Jumlah alat berat dalam kondisi baik	64	unit

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja			
			Indikator	Target	Satuan	
		Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Panjang jalan desa di kawasan strategis dan cepat tumbuh Kawasan Agropolitan dalam kondisi baik	234,98	km	
			Panjang jalan desa di kawasan strategis dan cepat tumbuh Kawasan Lumbung Padi dalam kondisi baik	224,75	Km	
	Peningkatan kualitas pengelolaan dan penyediaan sumber daya air					
		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	22,562	m/Ha	
			Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	74,6	%	
		Program pengendalain banjir	Panjang saluran/sungai yang dinormalisasi	2,5	m	
			Panjang bangunan proteksi sungai	11.881,21	M	
		Penataan lingkungan perkotaan	Program pembangunan jalan lingkungan permukiman perkotaan	Panjang Jalan Lingkungan Permukiman di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam kondisi baik	227,3	km
	Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong		Panjang drainase yang belum terbangun	24,073	m	

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja			
			Indikator	Target	Satuan	
			Panjang drainase yang dipelihara	500	m	
			Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	12,78	%	
	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	66,75	%	
	Program Lingkungan sehat perumahan	Program Lingkungan sehat perumahan	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perkotaan	65,5	%	
			Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perdesaan	30,6	%	
		Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	65,2	%	
			Persentase Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk	0,068	%	
Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas		Jumlah fasilitas keselamatan lalulintas	440	unit	
			Jumlah halte	15	unit	
	Program pembangunan prasarana dan fasilitasi perhubungan		Jumlah Terminal dalam kondisi baik	12	unit	
			Jumlah uji KIR angkutan umum	3.169	unit	
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ		Jumlah uji KIR angkutan tidak umum	6.657	unit	
			Lama pengujian kelaikan kendaraan	22	menit	
			Biaya pengujian kelaikan kendaraan	45.000 s/d 140.000	rupiah	
			Jumlah alat uji yang berfungsi	10	unit	
		Program peningkatan pelayanan angkutan		Jumlah izin dan pembaharuan trayek	659	ijin

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
Meningkatkan kinerja aparatur dan tata kelola pemerintah daerah	Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat penjurangan struktural, teknis dan fungsional bagi PNS dan non PNS	1.300	orang
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	300	orang
		Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Jumlah PNS yang pindah tugas dan pension	1.072	orang
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	jumlah pengelolaan data kepegawaian dan rencana pengembangan karier aparatur	2	kegiatan
			jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan	1.725	orang
	Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan				
	Pentaan Sistem Hukum dan Penegakan hukum	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tersusunnya Peraturan Perundang-Undangan daerah :		
			- Perda	10	buah
			- Perbup	10	buah
			- SK	582	buah
		- Perjanjian	10	buah	
Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya APBD	2,1 triliun	Rp	

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
	Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah pertemuan dengan dunia usaha	4	kali
		Program peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Meningkatnya fasilitasi persiapan kerjasama daerah dan batas daerah kab ciamis	3	lokasi
		Program Kerjasama pembangunan	Jumlah seminar	3	kali
	Penataan Sistem Informasi pembangunan Daerah	Program Pengembangan data/ informasi	Jumlah dokumen pengembangan data	1	dokumen
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah website pemerintah daerah	1	website
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi	1.042	lembar
	Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi (kearsipan)	Jumlah pengamanan arsip vital/arsip aset pemerintah daerah	2	dokumen kegiatan
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya APBD	2,1 triliun	Rp
		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Tersusunnya dokumen pemenuhan data dan informasi	5	dokumen
Program Perencanaan Pembangunan Daerah		tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	4	dokumen	

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi	2	dokumen
		Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	jumlah dokumen perencanaan bidang sosial budaya	1	dokumen
		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	jumlah dokumen perencanaan bidang prasarana wilayah dan SDA	1	dokumen
		program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan	aparatur perencana yang terlatih	60	orang
		program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	jumlah dokumen penanggulangan bencana		dokumen
			Tersedianya Peta Daerah Rawan Gerakan tanah	1	kecamatan
		Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah pertemuan dengan dunia usaha	4	kali
		Program pengembangan data/informasi	Jumlah dokumen pengembangan data	1	dokumen
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	jumlah penyediaan tanah pemda	8	buah
		Program Penataan penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah dokumen kajian pemanfaatan lahan dan kebutuhan lahan	11	dokumen

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
		Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Jumlah penyelesaian kasus tanah pemda	3	kajian
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah website pemerintah daerah	1	website
		Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	terfasilitasi kegiatan KDH/WKDH	100	%
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	tertatanya daerah otonomi baru melalui fasilitasi daerah otonomi baru	-	laporan
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Jumlah entitas yang diperiksa	360	entitas
		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	jumlah AKIP/pejabat fungsional yang bersertifikat/ mengikuti bimtek	80	orang
		Program Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan	jumlah SOP, DMA, DMP dan kebijakan pengawasan yang diterbitkan	9	dokumen
		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	terpeliharanya dokumen arsip daerah	63	SKPD
		Program Fasilitasi Kegiatan Keprotokolan	terfasilitasinya kegiatan keprotokolan	10	kegiatan

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
		program penataan daerah otonom	terfasilitasinya kegiatan kecamatan dan kelurahan	100	%
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Raperda yang ditetapkan menjadi Perda	28	Perda
		Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kapasitas serta profesionalisme aparatur	100	%
			IKM terhadap pelayanan perijinan	75	point
			IKM terhadap pelayanan publik	100	persen
		Program Fasilitasi dan Pengembangan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya koordinasi bidang perekonomian	4	kali
		Program Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Daerah	terfasilitasinya dan terkoordinasinya pembangunan daerah	100	%
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi bak	6	%
	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	4	dokumen
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi	2	dokumen

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja			
			Indikator	Target	Satuan	
		Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	jumlah dokumen perencanaan bidang sosial budaya	1	dokumen	
		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	jumlah dokumen perencanaan bidang prasarana wilayah dan SDA	1	dokumen	
		program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan	aparatur perencana yang terlatih	60	orang	
		program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	jumlah dokumen penanggulangan bencana		dokumen	
			Tersedianya Peta Daerah Rawan Gerakan tanah	1	kecamatan	
		Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah pertemuan dengan dunia usaha	4	kali	
		Program Pengembangan data/informasi	Jumlah dokumen pengembangan data	1	dokumen	
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kepemilikan KK	100	%	
	Pembangunan Perdesaan	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan BPD	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah pembinaan di tingkat desa	2	kali
				Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	2	desa
Jumlah Aparatur Desa Yang Dibina				88	orang	

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
			Pembinaan dan Pelatihan BPD	100	orang
			Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	100	kali
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Keuangan Desa	Jumlah ADD	50 milyar	rupiah
		Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintah Desa.	Terfasilitasi dan terkoordinasinya pemerintahan desa di tingkat desa	100	persen
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa.	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pedesaan	persentase kantor desa dengan kondisi baik	81,4	%
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pem-bangunan desa.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Tingkat keterlibatan dan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	45	lembaga
			Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan	69 Milyar	rupiah
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	1
	Penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah BUMDes yang terbentuk	5	BUMDes
			UPK Yang terbina	26	Kelompok

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Terfasilitasinya BBGRM, TMMG dan BSMSS	71,5 Milyar	rupiah

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program dan kegiatan prioritas yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019 serta Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019 yang kemudian mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019, perubahan penjabaran tersebut dalam rangka mengakomodir adanya penambahan pendapatan yang bersumber dana dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Ciamis sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 serta adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah maka disusun Perubahan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2019. Terdapat beberapa rekomendasi kebijakan dan penyelenggaraan urusan yang harus disesuaikan pada program dan kegiatan masing-masing urusan. Rekomendasi hasil evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 perlu ditindaklanjuti dengan adanya perubahan program dan kegiatan pada RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2019, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan dan penambahan kegiatan baru, dikarenakan adanya penambahan sumber pendanaan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Jumlah usulan anggaran pada perubahan RKPD Kabupaten Ciamis tahun 2019, dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebesar Rp 2.596.345.743.196,- yang direncanakan untuk membiayai 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar, 8 urusan pilihan, 5 urusan penunjang pemerintahan, 4 urusan pendukung, serta Non Urusan. Rekapitulasi anggaran pada Perubahan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Per PD sebagaimana pada Tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1.
Rekapitulasi Anggaran Pada
Perubahan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Per PD

NO	PD	ANGGARAN			
		APBD KABUPATEN	APBD PROVINSI	APBN	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan	125.143.824.500	3.625.200.000	216.855.265.000	345.624.289.500
2	Dinas Kesehatan	203.454.748.176	103.462.769.600	70.807.283.050	377.724.800.826
3	Rumah Sakit Umum Daerah	125.716.935.000	66.600.000.000	56.701.800.000	249.018.735.000
4	Dinas Pekerjaan Umum , Penataan Ruang dan Pertanahan	278.370.873.000	194.450.000.000	51.777.500.000	524.598.373.000
5	Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	317.507.882.950	180.608.000.000	6.190.000.000	504.305.882.950
6	Satuan Polisi Pamong Praja	16.817.073.718	2.505.500.000		19.322.573.718
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.233.511.000	-	-	3.233.511.000
8	Dinas Sosial	2.570.000.000	500.000.000	52.100.000.000	55.170.000.000
9	Dinas Tenaga Kerja	2.482.200.000	-	-	2.482.200.000
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.809.600.000	-	-	5.809.600.000
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.840.447.750	24.350.810.500	-	30.191.258.250
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	28.849.638.115	10.300.000.000	8.394.238.115	47.543.876.230
13	Dinas Perhubungan	32.776.355.000	-	-	32.776.355.000
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.409.142.000	6.450.000.000	-	8.859.142.000
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	8.174.888.000	10.000.000.000	4.973.761.000	23.148.649.000
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.107.200.000	9.520.620.000	-	11.627.820.000
17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	10.348.645.000	3.000.000.000	-	13.348.645.000
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.261.000.000	2.250.000.000	-	8.511.000.000
19	Dinas Pariwisata	12.300.735.000	17.083.013.000	7.253.472.000	36.637.220.000
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10.368.827.000	15.425.000.000	133.268.971.000	159.062.798.000
21	Dinas Peternakan dan Perikanan	2.664.722.000	-	2.086.414.000	4.751.136.000
22	Inspektorat	6.191.307.365	635.000.000	-	6.826.307.365
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.243.142.800	-	-	5.243.142.800
24	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	35.482.676.400	-	-	35.482.676.400
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.666.353.200	-	-	9.666.353.200
26	Sekretariat Daerah	35.353.668.757	-	-	35.353.668.757
27	Sekretariat DPRD	20.742.140.000	-	-	20.742.140.000
28	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3.032.844.000	1.700.000.000	-	4.732.844.000
29	Kecamatan Ciamis	5.415.939.500	-	-	5.415.939.500
30	Kecamatan Baregbeg	367.163.000	-	-	367.163.000
31	Kecamatan Sadananya	395.489.000	-	-	395.489.000
32	Kecamatan Cikoneng	254.993.800	-	-	254.993.800

NO	PD	ANGGARAN			
		APBD KABUPATEN	APBD PROVINSI	APBN	JUMLAH
33	Kecamatan Sindangkasih	354.105.000	-	-	354.105.000
34	Kecamatan Cijeungjing	373.714.000	-	-	373.714.000
35	Kecamatan Cimaragas	354.611.000	-	-	354.611.000
36	Kecamatan Cidolog	269.720.000	-	-	269.720.000
37	Kecamatan Cihaurbeuti	368.714.000	-	-	368.714.000
38	Kecamatan Panumbangan	395.886.000	-	-	395.886.000
39	Kecamatan Panjalu	307.531.000	-	-	307.531.000
40	Kecamatan Sukamantri	330.013.500	-	-	330.013.500
41	Kecamatan Kawali	197.738.000	-	-	197.738.000
42	Kecamatan Lumbung	388.575.000	-	-	388.575.000
43	Kecamatan Panawangan	453.466.000	-	-	453.466.000
44	Kecamatan Cipaku	386.929.000	-	-	386.929.000
45	Kecamatan Jatinagara	343.032.000	-	-	343.032.000
46	Kecamatan Rajadesa	337.495.400	-	-	337.495.400
47	Kecamatan Rancah	328.860.000	-	-	328.860.000
48	Kecamatan Tambaksari	364.914.000	-	-	364.914.000
49	Kecamatan Cisaga	347.526.000	-	-	347.526.000
50	Kecamatan Sukadana	255.875.000	-	-	255.875.000
51	Kecamatan Laksbok	390.739.000	-	-	390.739.000
52	Kecamatan Purwadadi	367.163.000	-	-	367.163.000
53	Kecamatan Pamarican	395.886.000	-	-	395.886.000
54	Kecamatan Banjarsari	384.412.000	-	-	384.412.000
55	Kecamatan Banjaranyar	420.255.000	-	-	420.255.000
	JUMLAH	1.333.471.125.931	652.465.913.100	610.408.704.165	2.596.345.743.196

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 14 Tahun 2018. Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II, menunjukkan bahwa RKPD tersebut perlu adanya penyesuaian. Penyesuaian dimaksud meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, pergeseran pagu antar SKPD, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2019 memuat perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Hal ini bertujuan agar pembangunan daerah Tahun 2019 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selain itu, Perubahan RKPD Tahun 2019 juga mempertimbangkan realisasi pendapatan dan belanja sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, untuk merumuskan kebijakan anggaran berbasis program secara efektif dan efisien.

Pada dasarnya Perubahan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2019 dilakukan dalam upaya mengefektifkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat keberhasilan pembangunan di Kabupaten Ciamis selain ditentukan oleh kinerja jajaran pemerintahan, juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat dan swasta untuk menjawab tantangan dan permasalahan serta mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Ciamis sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019.

BUPATI CIAMIS

H. HERDIAT SUNARYA